

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
KERJASAMA EKONOMI ACFTA (*ASEAN-CHINA
FREE TRADE AGREEMENT*) DAN DAMPAKNYA
BAGI PEREKONOMIAN DI INDONESIA**



OLEH :

A. TRIMAYASARI TAHIR

B111 13 341

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
KERJASAMA EKONOMI ACFTA (*ASEAN-CHINA FREE
TRADE AGREEMENT*) DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEREKONOMIAN DI INDONESIA**

Oleh :

A.TRIMAYASARI TAHIR

B111 13 341

SKRIPSI

Disusun sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Internasional

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KERJASAMA
EKONOMI ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT) DAN
DAMPAKNYA BAGI PEREKONOMIAN DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

A. TRIMAYASARI TAHIR

B111 13 341

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 8 Agustus 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 002


Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H.
NIP. 19581231 198703 1 014

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: A. TRIMAYASARI TAHIR
Nomor Pokok	: B11113341
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kerjasama Ekonomi ACFTA (ASEAN- CHINA Free Trade Agreement) dan Dampaknya Bagi Perekonomian di Indonesia


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Juni 2017

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H
NIP. 19631028 199002 1 002


Dr. Laode Abd. Gani, S.H, M.H.
NIP. 19581231 198703 1 014



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A TRIMAYASARI TAHIR
Nomor Pokok	: B11113341
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kerja Sama Ekonomi ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement) dan Dampaknya Bagi Perekonomian di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

A. TRIMAYASARI TAHIR (B111 13 341), Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kerjasama Ekonomi ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) dan Dampaknya Bagi Perekonomian di Indonesia. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai pembimbing I dan Abd. Laode Gani sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Internasional yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama ekonomi ACFTA, dan (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kerjasama ekonomi ACFTA terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta, yakni di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperoleh bahan sekunder melalui teknik pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) pelaksanaan perdagangan bebas ACFTA di Indonesia secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement on Comprehensive Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*. (2) ACFTA menimbulkan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Kerugian akibat ACFTA bagi Indonesia dimana eksploitasi barang-barang produksi Cina terhadap produk Indonesia.

Kata Kunci : Kerjasama Ekonomi, ACFTA, Perdagangan Bebas

ABSTRACT

A TRIMAYASARI TAHIR (B111 13 341), The Observation of International Laws Against Economic Cooperation of ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) and It's Impacts for the Economy in Indonesia. Under the guidance of Juajir Sumardi as the first supervisor and Abd. Laode Gani as the second supervisor.

This study aims: (1) to find out how the International Law arrangements which are contained in the ACFTA economic cooperation agreement and (2) to know how ACFTA economic cooperation influences on the national economical growth of Indonesia.

This research was conducted in Jakarta, in Kementerian Perdagangan Republik Indonesia to obtain secondary data through data collection techniques. In addition, this research also uses the method of library research.

The results of this study are as follows: (1) ACFTA free trade in Indonesia is regulated in accordance with the provisions stipulated in the *Framework Agreement on Comprehensive Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*. (2) ACFTA poses positive and negative impacts to Indonesian economy. The disadvantage for Indonesia which is caused by ACFTA is where exploitation of Chinese products against Indonesian products.

Keywords : Economic Cooperation, ACFTA, Free Trade

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SubhanahuWata'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kerjasama Ekonomi ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) dan Dampaknya Terhadap Perekonomian di Indonesia" yang merupakan suatu tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Sebuah apresiasi dan dedikasi yang besar kepada orang tua saya **H. Muhammad Tahir** dan **Hj. A. Maryam**, yang senantiasa mendidik dan mengajarkan penulis untuk memahami semua kondisi yang harus dihadapi dengan sabar, memotivasi penulis untuk selalu berdoa kepada Tuhan atas segala sesuatu oleh-Nya. Dan juga kepada saudara kandung penulis **A. Ayu Rahayu** dan **A. Nur Alisa**, yang segala cara dan waktu mendukung penulis dalam situasi apapun.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, yaitu **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H, M.H**, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H**, dan **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H** atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak **Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H, M.H** dan **Dr. Laode Abd. Gani, S.H, M.H** selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dan dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan fikiran para pembimbing yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak **Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H, M.H**, Bapak **Dr. Maasba Magassing, S.H, M.H**, dan Bapak **Dr. Maskun, S.H, LLM** selaku penguji skripsi atas segala masukan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Muhammad Basri, S.H, M.H** selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh staff/pegawai akademik terkhusus bapak Ronny yang senantiasa dengan sabar membantu penulis selama melakukan pemberkasan dan kebutuhan-kebutuhan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasuddin yang telah senantiasa menyediakan waktu dan tempat untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mewakili Ibu **Wiwik Sri Sundari** dan Mba **Ziza Salam** yang telah berkenan untuk memfasilitasi penulisan ini pada tahap penelitian.
10. Sahabat-sahabat penulis **A. Novita Annisa Aslam, S.Ip, A. Adlia Adel, S.H,** dan **Ummul Muchmin Mustafa, S.E** yang senantiasa mendukung dan memberi semangat tanpa henti kepada penulis. Dan juga kepada **Ratna, S.E** dan **Muhammad Ilham Ali, S.S** yang juga banyak membantu penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dalam menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin **Ayu, Weni, Fitri, Abdi** dan **Fenny**.
12. Teman-teman *big class* penulis **Ummu, Cua, Asmi, Wiwi** dan **Nina**.

13. Teman-teman KKN Internasional angkatan 93 Universitas Hasanuddin khususnya sahabat-sahabat #janganpanikmaripiknik **Ratu, Yada, Athira, Anis, Inda, dan Dini**, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan selama menjalani masa KKN.

14. Kepada seluruh keluarga terkhusus sepupu-sepupu penulis yang telah banyak membantu dan menemani penulis selama menjalani masa pendidikan sejak Sekolah Menengah Atas hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

15. Teman-teman seangkatan 2013 (ASAS 2013). Terima kasih atas segala bantuan, pertemanan, pengetahuan dan seluruh pengalaman selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masi terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama perkembangan hukum di Indonesia.

Makassar, Agustus 2017

A. Trimayasari Tahir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Internasional.....	15
1. Pengertian Perjanjian Internasional	15
2. Klasifikasi Perjanjian Internasional.....	17
3. Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional	22
4. Berlakunya Perjanjian Internasional.....	24
5. Pembatalan atau Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	26
B. Hukum Ekonomi Internasional	28
1. Pengertian Hukum Internasional	28
2. Subyek Hukum Ekonomi Internasional	30
a. Negara	32
b. Individu	34
c. Perusahaan Transnasional.....	34
d. Organisasi Ekonomi Internasional	39

C. ACFTA (<i>ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT</i>)	42
D. Perdagangan Bebas	49
E. Prinsip-Prinsip Perdagangan Bebas	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	57
B. Jenis dan Sumber Data	57
C. Teknik Pengumpulan Data	58
D. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Kerjasama ACFTA (<i>ASEAN-China Free Trade Agreement</i>).....	59
1. Pengaturan Pemberlakuan Kerjasama Ekonomi ACFTA.....	64
2. Kesepakatan Dalam Perjanjian Kerjasama Ekonomi ACFTA..	65
3. Pemberlakuan Prinsip <i>Most Favoured Nation Treatment</i>	69
4. Penyelesaian Sengketa dan Negosiasi.....	70
B. Pengaruh Perdagangan ACFTA Terhadap Ekspor dan Impor Indonesia-Cina	70
1. Realisasi Ekspor dan Impor Indonesia ke Negara Tujuan	70
2. Keuntungan Dari Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ACFTA Bagi Indonesia	74
3. Keuntungan dari Perjanjian ACFTA Bagi Indonesia Sebagai Anggota ASEAN	78
4. Kerugian Dari Perjanjian ACFTA Bagi Indonesia Sebagai Negara	81
5. Kerugian Dari Perjanjian ACFTA Bagi Indonesia Sebagai Anggota ASEAN	83
6. Peluang dan Tantangan Indonesia Dalam Kerjasama ACFTA	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN	95
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	62
Tabel 2	71
Tabel 3	72
Tabel 4	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Penelitian

Lampiran II Naskah Perjanjian Kerjasama *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia terletak diantara benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Pada posisi seperti ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia karena berada pada posisi silang (*world cross position*) yang ramai sehingga menguntungkan dari segi ekonomi. Salah satu jalur sutra laut yang melalui Selat Malaka ke India ialah dari Tiongkok dan Indonesia. Perdagangan laut antara Tiongkok, India dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah Barat.

Terdapatnya hubungan antarpulau dan hubungan dengan dunia luar merupakan kecenderungan dari hubungan perdagangan. Pada khususnya perdagangan itu terjadi karena adanya pertukaran antara berbagai hasil daerah.¹

Hubungan dagang antarpulau lambat laun berkembang menjadi perdagangan yang lebih luas. Hubungan antara Indonesia dengan India dan Cina telah berkembang sejak permulaan tarikh Masehi. Salah seorang sarjana Belanda bernama J.C. Van Leur mengemukakan

¹ <http://studyandlearningnow.blogspot.co.id/2013/01/sejarah-perdagangan-di-indonesia.html>
diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 22.03 WITA

pendapatnya bahwa perdagangan itu telah terjadi dengan dunia luar terlebih dahulu dengan India barulah kemudian disusul dengan Cina. Barang-barang yang diperdagangkan dalam pasaran internasional di Asia Tenggara pada waktu itu ialah barang-barang bernilai tinggi, seperti: logam mulia (emas dan perak), perhiasan, barang tenunan, barang pecah belah dan berbagai barang kerajinan, wangi-wangian serta obat-obatan.

Perdagangan antar bangsa semakin meningkat ketika memasuki awal masehi, karena sudah ditemukan pemukiman dan pelabuhan di daerah pesisir sehingga memudahkan dalam pendistribusian barang-barang yang diinginkan serta menandakan kejayaan suatu negara yang dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.

Orang-orang Cina adalah etnis yang menguasai sebagian besar perdagangan di Indonesia, mulai dari hulu sampai hilir sebagian besar jalur distribusi barang dikuasai oleh etnis ini. Penguasaan etnis Cina atas jalur distribusi terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Penelusuran atas hal tersebut dapat dilakukan sejak masa kolonial Belanda. Orang-orang Cina dalam struktur perdagangan kolonial telah dipakai sebagai pihak perantara antara orang-orang Belanda dengan orang-orang pribumi, selain itu mereka diberikan fasilitas monopoli perdagangan dan sebagai pelaksana rumah pegadaian, serta pemungut pajak.

Pada masa pemerintahan orde baru, pedagang beretnis Cina juga mendapatkan fasilitas yang berlebih atas perdagangan, sehingga dapat mendominasi retail, usaha kecil, perdagangan komoditas, perdagangan besar, transportasi, industri, perbankan, dan keuangan pada lapisan tertinggi dalam sistem perekonomian di Indonesia.

Bangsa Cina sendiri termasuk bangsa yang mobilitasnya tinggi. Hal ini dapat diketahui dari tingginya perpindahan (migrasi) penduduk di negara Cina. Orang Cina datang ke Indonesia, khususnya, dan Asia Tenggara pada umumnya datang merantau dengan tujuan untuk mencari peruntungan nasib yang baik. Mereka datang semata-mata hanya untuk mempertahankan hidupnya, entah dengan berdagang, menjadi kuli atau petani. Hal ini dilakukan orang Cina karena dorongan faktor ekonomi, terutama karena kehidupan yang serba sulit akibat dari padatnya penduduk, sehingga lapangan pekerjaan di daerah asal mereka semakin sedikit.

Dipantai utara Jawa, pedagang-pedagang Cina memegang peranan yang penting sebagai pemula dan pendorong usaha di berbagai bidang kegiatan ekonomi. Umumnya mereka berdagang kain atau barang-barang kelontong. Sejak itulah Cina memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia.²

² https://www.academia.edu/5135355/Etnis_cina_dlm_perdagangan_di_indonesia diakses pada 2 Agustus 2017 pukul 23.58 WITA

Secara historis Indonesia melakukan perjanjian diplomatik dengan Cina sejak 13 April 1950. Dengan adanya perjanjian ini, akan sangat menguntungkan bagi kedua negara. Ada empat bidang dalam kerjasama ini, yaitu politik dan keamanan: ekonomi dan pembangunan: maritime, luar angkasa, iptek, dan sosial budaya serta kerjasama regional dan internasional.

Indonesia sendiri telah mengenal sistem perdagangan internasional sudah sejak berabad-abad lalu dimulai dari dibukanya jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti India dan Cina yang merupakan pelopor dari perdagangan yang bersistem internasional di Indonesia. Dalam kaitannya, ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.³

Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional terus meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual; atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan

³ Huala Adolf, 2013, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2

perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antarnegara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional seperti perdagangan internasional (*international trade law*).⁴

Perjuangan negara-negara ini untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan (kontrol) terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara-negara untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan negara-negara lainnya. Mereka menyadari bahwa perdagangan adalah satu-satunya cara untuk pembangunan ekonomi mereka. Adanya hubungan perdagangan antarnegara atau perdagangan internasional adalah sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan antarnegara, baik ditingkat global seperti, *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) maupun pada tingkat regional seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Asia and Pasific Economic Cooperation* (APEC), dan *China and ASEAN Free Trade Area* (CAFTA).⁵

Dalam upaya negara-negara ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Dewasa ini mereka cenderung membentuk blok-blok perdagangan baik bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam kecenderungan ini pun perjanjian internasional menjadi semakin penting.

⁴ Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Muhammad Sood, *ibid.*, hlm. 8.

Semakin pentingnya peran perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi atau perdagangan ini pun telah melahirkan aturan-aturan yang mengatur perdagangan internasional di bidang barang, jasa dan penanaman modal di antara negara-negara. Beberapa kebijakan yang dilakukan suatu negara dalam membentuk kebijakan perdagangan internasionalnya adalah dengan membentuk aliansi negara persekutuan yang bertujuan untuk menyatukan semua kebijakan-kebijakan yang berbeda di setiap negara aliansinya menjadi satu tujuan kegiatan perdagangan internasional untuk membentuk suatu kesepakatan bersama.

Salah satu bentuk kerjasama perdagangan internasional adalah dibentuknya suatu organisasi yang biasanya meliputi wilayah negara itu sendiri ataupun kecenderungan komoditi unggulan dari negara tersebut. Indonesia sendiri jika ditinjau dari segi wilayah dan letak geografisnya maka dapat dilihat bahwa Indonesia masuk kedalam batas wilayah perdagangan khusus negara-negara Asia Tenggara.

ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nations*) didirikan oleh lima negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada bulan Agustus 1967. Instrumen yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (*the ASEAN*

Declaration atau Bangkok Declaration) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.⁶

Pembentukan perhimpunan ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap ancaman eksternal dan internal di kawasan ini pada tahun 1960-an. Ancaman eksternal adalah semakin kuatnya pengaruh komunisme di kawasan Asia umumnya. Selain itu perang Vietnam pada waktu itu semakin panas. Ancaman internal adanya pertikaian sesama negara di kawasan ini, misalnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Dengan terbentuknya organisasi ASEAN, organisasi ini terus menerus melakukan pembenahan diri dan konsolidasi ke arah langkah-langkah yang lebih teratur dan penuh percaya diri dalam melakukan kerja sama di bidang ekonomi, termasuk di sektor perdagangan dan industri.⁷

Keberadaan negara-negara ASEAN merupakan kekuatan politik dan ekonomi pada wilayah Asia Pasifik. Keberadaan negara-negara di Asia Tenggara dengan komunitas ASEAN ini mempunyai kekuatan dalam ekonomi dan posisi politik internasional. Berkembangnya blok regional ini diperhitungkan oleh negara-negara di dunia. Dalam perkembangannya di bidang ekonomi negara-negara ASEAN memiliki visi untuk mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) yang akan dihadapi pada tahun 2015 dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai sebuah kawasan yang stabil,

⁶Huala Adolf, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar* Cetakan ke 6, CV Keni Media, Bandung, hlm. 96.

⁷ Muhammad Sood, *ibid*, hlm. 92

makmur, dan berdaya saing tinggi.⁸ Didalamnya terdapat aliran bebas dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin berkurang.

Dari beberapa mitra ASEAN, Cina merupakan negara yang mengalami perkembangan paling pesat. Pasca reformasi Deng Xio Ping, Cina mengalami kemajuan yang sangat besar terutama dalam bidang ekonomi. Faktanya saat ini Cina telah menjadi salah satu negara penggerak perekonomian dunia. Hal ini dapat dilihat dari potensi sumber daya manusia, alam, dan keberagaman corak wilayah yang dimiliki. Seperti diwilayah timur kondisinya lebih cenderung beriklim dingin hal ini karena wilayah tersebut memiliki batas wilayah dengan Rusia dan Korea Selatan sedangkan di sebelah barat kondisi geografisnya cenderung beriklim panas karena wilayah tersebut berbatasan dengan gurun gobi. Potensi keberagaman corak wilayah inilah menjadi indikator mengapa Cina dewasa ini menjadi negara yang sangat dominan terutama dibidang ekonomi dan perdagangan internasional.

Selain itu produk-produk dari Cina yang telah mampu menjangkau berbagai belahan dunia juga menjadi aspek penting dalam menilai kemajuan negara ini dibidang ekonomi dan industri. Selain luasnya wilayah perdagangan, Cina juga memiliki kelebihan dimana harga produk yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding dengan negara lain seperti

⁸Gracia Regina Redu, 2013, "*Tindak Lanjut Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Oleh Indonesia Dalam Menghadapi Kerjasama ACFTA (ASEAN FREE TRADE AGREEMENT)*", Skripsi, Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 13

produk negara dari Amerika Serikat, Jerman atau negara tetangganya seperti Jepang, Korea Selatan, dll. Disamping itu Cina memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia yang merupakan aspek terpenting dalam memajukan perekonomian di negara tersebut dan kemajuan teknologi serta infrastruktur lainnya yang tentu saja dapat menunjang kemajuan negara ini.

Setiap kawasan perdagangan bebas itu didasari oleh perjanjian internasional terlebih dahulu. Dapat dilihat berbagai perjanjian kerjasama ekonomi regional untuk membentuk kawasan perdagangan bebas seperti kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (*North American Free Trade Area*), Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Community*) dan Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation*), Kawasan Daratan Eropa (*European Free Trade Association*), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (*Asean-China Free Trade Area*), dan kawasan lainnya.⁹ Maraknya integrasi ekonomi regional tersebut dikarenakan adanya pemikiran pembentukan kerjasama dengan tujuan untuk meningkatkan posisi dan daya saing perekonomian negara maupun regional dalam menghadapi persaingan global yang semakin meningkat.

Keputusan untuk membentuk zona perdagangan bebas antar ASEAN dan Cina merupakan tanggapan terhadap usulan yang muncul

⁹ Johanes Gunawan, 2003, *Aspek Politik Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173

dari mantan Perdana Menteri Cina, Zhu Rongji, saat dilangsungkan konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN ke-6 pada November 2000¹⁰. ASEAN merupakan pilihan yang logis bagi Cina karena, selain ASEAN dapat menjadi pasar yang besar bagi ekspor Cina, kawasan ini juga kaya akan sumber daya alam yang dapat memberikan pasokan memadai untuk kebutuhan peningkatan industri Cina. ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001 digelar *ASEAN-China Summit* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan Cina ini menyetujui usulan membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan disekitar area sungai Mekong.¹¹

Perjanjian ini merupakan langkah untuk pengembangan ekonomi di kawasan ASEAN dan Cina, sehingga produk ASEAN dan Cina bisa saling mengisi dan melengkapi pasar dikedua pihak, yakni Cina dan ASEAN sehingga direncanakan akan memperkuat perekonomian kedua belah pihak. Sejak perjanjian ACFTA mulai diberlakukan tentunya negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia telah mempersiapkan diri dalam menghadapi peluang dan tantangan yang ada. Sebagai bagian dari keseriusan pemerintah mengawali dengan meratifikasi *Framework*

¹⁰Gracia Regina Redu, *op.cit.*, hlm. 14

¹¹Idar Desriyanti, 2013, "*Pengaruh ASEAN-China Free Trade Agreement Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia*", Skripsi, Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12.

Agreement ASEAN-China FTA melalui keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.¹²

Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004, Pasal 1 :

Mengesahkan *framework Agreement on comprehensive Economic cooperation between the association of South East Asian Nations and the people's Republik of Cina* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan republik rakyat Cina), yang telah ditanda tangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom penh, Kamboja, apada tanggal 4 November 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Cina (yang salinan naskah aslinya dalam bahasa inggris dan terjemahannya terlampir pada keputusan presiden ini).

Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia telah siap dalam menghadapi ACFTA, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika Indonesia menandatangani suatu perjanjian maka ada kewajiban Indonesia untuk memberlakukan perjanjian tersebut. Namun dalam praktiknya, Indonesia jauh dalam mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ACFTA, karena dalam perjanjian ACFTA sebagai Instrumen Kepentingan Negara dalam proses pengambilan kebijakan masih mengalami ketimpangan dimana setiap perjanjian internasional wajib diratifikasi dan disahkan oleh DPR untuk menjaga dari kesewenangan presiden, yang langsung dituangkan dalam

¹²Sekretaris Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004, 15 juni 2004. (<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2004/048-04.pdf>)

keputusan presiden, dan bisa disimpulkan bahwa ada kepentingan politik didalamnya dan dampaknya terhadap masyarakat.¹³

Kebijakan tersebut tentunya dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap jalannya ekonomi di Indonesia apalagi Indonesia merupakan salah satu negara penggerak di kawasan ASEAN. Hal yang lain mendasari penulis untuk mengangkat isu ini serta menjadikannya sebagai bahan pembahasan adalah ketertarikan penulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan ACFTA terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia terlebih bagaimana kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menyambut penerapan kebijakan tersebut. Selain itu bagaimana aspek hukum internasional serta kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dapat berjalan setelah adanya ACFTA.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional yang terkandung didalam perjanjian kerjasama ekonomi ACFTA (ASEAN-China *Free Trade Agreement*) ?

¹³Lidya Christin Sinaga ,*Indonesia di Tengah Kesepakatan ACFTA ,Implementasi Jurnal Penelitian Politik* Volume 7 No. 2, 2010

2. Bagaimana pengaruh kerjasama ekonomi ACFTA (ASEAN-China *Free Trade Agreement*) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Internasional yang terdapat didalam perjanjian kerjasama ekonomi ACFTA
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kerjasama ekonomi ACFTA terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap kerjasama ekonomi ACFTA ini serta pengaruh dari kerjasama ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

2. Bagi Peneliti

Selanjutnya penelitian ini diharapkan memberi bahan, pertimbangan dan referensi dalam mengkaji pengaturan hukum internasional dan pengaruh kerjasama ekonomi ACFTA terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia

3. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan wacana bagi masyarakat dalam memahami pengaturan hukum internasional serta bagaimana pengaruh kerjasama ekonomi ACFTA terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan di antara anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa dan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi para pihak yang mengadakannya.¹⁴ Perjanjian Internasional timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar negara-negara di dunia, yang pada era globalisasi ini berkembang sehingga mencakup hubungan antara negara dengan organisasi internasional maupun antara organisasi internasional lainnya.¹⁵ Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum.¹⁶

Perjanjian internasional sendiri terdiri atas dua jenis perjanjian yakni perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral terdiri dari dua negara dan hanya mengikat kedua belah pihak sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang terdiri dari beberapa pihak (negara) yang mengatur hak dan kewajibannya masing-masing.

¹⁴ Ashri Muhammad, 2012, *Hukum Perjanjian Internasional*, Arus Timur, Makassar, hlm. 3.

¹⁵ Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 41.

¹⁶ Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 9.

Berikut beberapa pengertian perjanjian internasional :

- a. Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa perjanjian internasional di samping sebagai salah satu sumber hukum internasional, juga sebagai sumber hukum primer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam hubungan antarnegara.¹⁷
- b. Oppenheimer-Leuterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.
- c. Menurut Konvensi Wina (1969), Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antarnegara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrument tunggal atau dua atau lebih instrument yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.¹⁸
- d. Sedangkan dari segi hukum nasional Indonesia yang tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik. Pengertian ini belum lengkap bila tidak dikaitkan dengan

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 117.

¹⁸ Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 84.

ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pemerintah RI membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan etika baik.¹⁹

Jadi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarnegara dalam menjalin hubungan internasional sebagai pengikat dan pengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya dan juga menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut.

2. Klasifikasi Perjanjian Internasional

a. Berdasarkan Subjeknya;

Dari segi subjek yang terlibat dalam perjanjian internasional maka perjanjian internasional dapat dibagi atas perjanjian multilateral dan perjanjian bilateral. Perjanjian multilateral diadakan oleh lebih dari dua negara, sedangkan perjanjian bilateral diadakan oleh dua negara.²⁰

b. Berdasarkan Nama dan Bentuknya;

Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang didalam suatu perjanjian internasional.

¹⁹ Muhammad Ashri, *op.cit*, hlm. 4.

²⁰ *Ibid*, hlm. 25

Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait, serta dampak politis dan hukum bagi para pihak tersebut. Adapun bentuk dan nama perjanjian internasional yang seringkali dipraktikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Traktat (*Treaty*)

Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral. Namun demikian kebiasaan negara-negara di masa lampau cenderung menggunakan istilah *Treaty* untuk perjanjian bilateral. Sejak kemerdekaan Indonesia tidak pernah menggunakan judul *Treaty* sampai akhirnya Indonesia menggunakannya pada *Timor Gap Treaty 1989*. Penggunaan judul ini dimaksudkan untuk kebutuhan politis pada saat itu guna menarik perhatian dunia akan adanya pengakuan Australia terhadap Timor Timur melalui perjanjian tersebut. Selanjutnya, dalam rangka memberi bobot politis bagi hubungan bilateral dengan Australia, kedua negara kembali menggunakan judul *Treaty* pada *Lombok Treaty 2008*, yang menjadi perjanjian payung buat lembaran baru kerjasama bilateral yang komperhensif antara kedua negara.

2) Konvensi (*Convention*)

Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat "*Law Making Treaty*" dengan pengertian yang

meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Dewasa ini istilah ini lebih banyak digunakan untuk perjanjian multilateral. Judul ini pernah digunakan oleh Hindia Belanda untuk perjanjian-perjanjian perbatasan dengan negara tetangga.

3) Persetujuan (*Agreement*)

Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral, dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam *Treaty* atau *Convention*. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan dalam perjanjian multilateral.

4) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)

Dari perspektif politis Indonesia menggunakan MoU untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta “tidak terlalu mengikat”. MoU merupakan judul yang paling terbanyak dibuat oleh Indonesia dalam perjanjian-perjanjian bilateral.

5) Pengaturan (*Arrangement*)

Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada (sering disebut sebagai *specific/implementing arrangement*).

6) Pertukaran Nota Diplomatik/Surat (*Exchange of Notes/Letters*)

Pertukaran nota diplomatik adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Instrumen bisa menjadi suatu perjanjian internasional itu sendiri jika para pihak bermaksud untuk itu, yang dikenal dengan istilah *Exchange of Notes/Letters Constitute Treaty Agreement*. *Exchanges of Notes/Letters Agreement* dapat digunakan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan telah dipenuhinya prosedur konstitusional/ratifikasi suatu perjanjian internasional.
- b) Konfirmasi tentang kesepakatan terhadap perbaikan (*rectification*) dari suatu perjanjian internasional.
- c) Pengakhiran atau perpanjangan masa berlaku dari suatu perjanjian internasional.
- d) Penyampaian aspek-aspek teknis sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional.
- e) Bentuk lain dari perjanjian internasional (*Exchange of Notes Constitute Treaty*).

7) *Modus Vivendi*

Modus Vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal. Pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian yang lebih formal dan permanen.

8) *Agreed Minutes/Summary Records/Record of Discussion*

Istilah tersebut diatas adalah suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini banyak digunakan untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan sementara sebagai bagian dari suatu rangkaian putaran perundingan mengenai suatu masalah yang sedang dirundingkan.

c. Berdasarkan pelaksanaannya;

- 1) *Executed treaty*, berkenaan dengan suatu masalah tunggal yang dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut berarti perjanjian itu telah selesai. Sebagai contoh adalah perjanjian mengenai penentuan batas negara.
- 2) *Executory treaty*, menetapkan pelaksanaan perjanjian atau aplikasi serta tindakan-tindakan yang diperlukan lebih lanjut; misalnya perjanjian perdagangan ekstradisi dan sebagainya (von Glahn, 1981 : 480).²¹

d. Berdasarkan fungsinya;

- 1) *Law Making Treaty atau Law Creatin Treaty* (perjanjian yang membentuk atau menciptakan hukum), yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan

²¹ Muhammad Ashri, *Loc.cit.*

yang pada umumnya bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga.²²

2) *Treaty Contract* (perjanjian yang bersifat khusus atau kontrak), yaitu perjanjian yang menyerupai suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saja.

3. Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional

a. Perundingan (Negotiation)

Proses negosiasi adalah tahap pertama yang dilakukan oleh utusan resmi dari negara-negara yang bersangkutan. Perundingan atau negosiasi adalah musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang disetujui bersama.

Dalam melakukan perundingan masing-masing negara dapat mengirimkan perwakilannya dengan menunjukkan surat kuasa penuh. Jika sudah ada kesepakatan bersama menyangkut perjanjian ini maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Sesuai ketentuan Pasal 7 Konvensi Wina 1969 diatur bahwa utusan resmi suatu negara harus disertai dokumen *full powers* kecuali jika urusan tersebut memiliki jabatan atau posisi yang menurut praktik dan kebiasaan memang sudah memiliki

²²*Ibid*, hlm. 34.

wewenang untuk mewakili negaranya, tanpa memerlukan dokumen *full powers*.²³

b. Penandatanganan (Signature)

Setelah dilakukan perundingan akan ada proses penandatanganan. Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian multilateral (negara yang terlibat lebih dari dua maka hasil kesepakatan dianggap sah jika suara mencapai 2/3 suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Namun demikian perjanjian belum dapat diterapkan apabila melalui tahap pengesahan (ratifikasi) oleh masing-masing negaranya. Dalam beberapa situasi, penandatanganan dapat serta merta mengikat negara yang menandatangani. Namun, seringkali penandatanganan belum mengikat negara tersebut sampai adanya ratifikasi. Di beberapa negara seperti Indonesia dan Amerika Serikat, suatu perjanjian akan dianggap mengikat setelah diratifikasi, setelah melewati proses di badan legislatif.

c. Ratifikasi (Ratification)

Proses yang terakhir sebelum perjanjian itu berlaku adalah pengesahan atau ratifikasi. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, konstitusi, atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap

²³*ibid*

entitas kecil di dalam bagiannya. Proses ratifikasi konstitusi sering ditemukan pada negara federasi seperti Amerika Serikat atau konfederasi seperti Uni Eropa.

Pada Pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu negara menyatakan kesediannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.²⁴

Ketika suatu negara meratifikasinya, negara tersebut berkewajiban untuk mengundangnya ke dalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut.²⁵

4. Berlakunya Perjanjian Internasional

Berlakunya perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh RI bersama dengan suatu negara atau negara-negara lain baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dapat berlaku setelah perjanjian itu ditandatangani atau setelah perjanjian itu disahkan apakah dengan undang-undang ataupun keputusan presiden atau setelah diadakan pertukaran dokumen

²⁴ Ratifikasi, 2016 <https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi> , diakses pada Tanggal 14 Februari 2017 pukul 17.33 WITA

²⁵ Huala Adolf, 2009, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

perjanjian atau nota diplomatik atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.²⁶

a. Mulai Berlakunya Perjanjian Setelah Penandatanganan (*Entry into Force after Signature*)

Untuk perjanjian bilateral tertentu dengan materi yang tidak begitu penting dan biasanya merupakan perjanjian implementasi, maka pada umumnya perjanjian seperti itu mulai berlaku sejak ditandatangani. Akan tetapi dalam perjanjian multilateral, klausul penutup yang memuat mulai berlakunya perjanjian sejak tanggal penandatanganan jarang sekali dipakai. Hal ini antara lain disebabkan karena banyaknya para pihak pada perjanjian multilateral itu, kecuali untuk beberapa perjanjian multilateral yang para pihaknya terbatas pada beberapa negara tertentu saja, seperti perjanjian antara negara-negara dalam satu wilayah seperti ASEAN.²⁷

b. Notifikasi Telah Dipenuhinya Persyaratan Konstitusional

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak.

c. Pertukaran Piagam Pengesahan

Suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat mensyaratkan para pihak pada perjanjian tersebut untuk membuat piagam pengesahan. Piagam pengesahan ini dibuat oleh masing-masing pihak

²⁶ Muhammad Ashri, *Op.cit*, hlm. 46-47.

²⁷ *Ibid*, hlm. 49

setelah mereka mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan prosedur konstitusional yang berlaku di masing-masing negara.

d. Penyimpanan Piagam Pengesahan

Bagi perjanjian multilateral yang memerlukan piagam pengesahan mengingat banyaknya pihak-pihak pada perjanjian tersebut, maka piagam pengesahannya tidaklah dipertukarkan sebagaimana halnya dalam perjanjian bilateral. Dalam hal perjanjian multilateral, maka piagam pengesahan haruslah disimpan atau didepositkan di suatu tempat atau negara tertentu.

Perjanjian multilateral sebagaimana disebutkan diatas biasanya mulai berlaku setelah didepositkannya jumlah tertentu piagam pengesahan dari negara-negara penandatangan. Demikian setelah jumlah tersebut dipenuhi, maka perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif dan dapat dilaksanakan oleh sesama negara yang telah mendepositkan piagam pengesahannya.²⁸

5. Pembatalan atau Berakhirnya Suatu Perjanjian

Menurut Boer Mauna, batalnya suatu perjanjian internasional disebabkan karena:

- a. Bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional (*irregularitas formal*);

²⁸*Ibid*, hlm. 56.

- b. Adanya kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian (*irregularitas substansial*).

Masalah pembatalan, pengakhiran serta penangguhan suatu perjanjian internasional, dapat dilihat pengaturannya dalam Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian Internasional maupun dalam hukum nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perjanjian Internasional. Menurut ketentuan Pasal 18 dari Undang-Undang tersebut mengemukakan berbagai pertimbangan atau alasan yang dapat dipakai oleh suatu negara, dalam hal ini Indonesia dalam mengakhiri suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan dari para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- 2) Perjanjian yang telah berlaku telah mencapai tujuannya;
- 3) Terdapat perubahan mendasar (*fundamental change*) yang memengaruhi pelaksanaan daripada perjanjian tersebut;
- 4) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian itu;
- 5) Dibuatnya suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- 6) Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional;

7) Hilangnya objek hal-hal yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan nasional.²⁹

Meskipun ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional tidak menyebutkan masalah *invalidity* perjanjian, tetapi hanya mengemukakan masalah pengakhiran perjanjian, namun Undang-Undang ini pada prinsipnya menggabungkan dan mengintegrasikan semua alasan yang tercantum dalam part V dari Konvensi yang mencakup alasan-alasan mengenai batalnya suatu perjanjian (*invalidity of treaty*) sebagaimana diatur dalam Pasal 46-53 Konvensi Wina 1969 serta alasan-alasan pengakhiran dan penangguhan berlakunya perjanjian (*Termination and Suspension of the Operation of Treaty*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54-64 Konvensi tersebut. (Pasal 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional).

B. Hukum Ekonomi Internasional

1. Pengertian Hukum Ekonomi Internasional

Hukum ekonomi internasional adalah sebuah hukum yang sulit dipahami. Hal ini dikarenakan ruang lingkup hukum ekonomi lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan ruang lingkup hukum lainnya. Adanya keberagaman prinsip ekonomi dari setiap negara diseluruh dunia membuat sebuah hubungan ekonomi sulit ditebak. Salah satunya adalah kebijakan pasar bebas yang bisa membuat hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi yang terkadang tidak seimbang. Hal seperti inilah

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

yang biasanya mengakibatkan salah satu negara dirugikan karena hubungan ekonomi internasional.

Meskipun demikian menarik kiranya untuk mengetahui bagaimana definisi dari hukum ekonomi internasional tersebut. Secara umum pengertian hukum ekonomi internasional adalah sebuah hukum yang mengatur adanya transaksi ekonomi antarnegara. Hal ini menyangkut berbagai hal yang bisa dinilai dengan ekonomi, mulai dari hukum ekspor dan impor hingga peraturan perdagangan bebas antarnegara telah diatur disini. Berikut pengertian hukum ekonomi internasional menurut beberapa ahli :

Menurut salah satu pakar ekonomi Indonesia Ismail Saleh berpendapat pengertian hukum ekonomi internasional yakni sebuah hukum yang berperan dalam sebuah pembangunan ekonomi. Dalam hal ini hukum ekonomi internasional adalah sebuah pengaman agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan karena adanya pembangunan yang sedang berlangsung.

Definisi hukum ekonomi internasional menurut John H. Jackson. Beliau beranggapan bahwa: *"International economic Law could be defined as including all legal subjects which have both an international and an economic component"*. Pendapatnya mengatakan bahwa hukum ekonomi internasional adalah semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi. Menurut Jackson, bidang hukum

ekonomi internasional memiliki kaitan erat dengan hukum internasional publik.³⁰ Pendapat John H. Jackson kemudian dipertegas bahkan diperluas oleh sarjana berkebangsaan Swiss, Ernst Ulrich Petersmann. Menurut beliau, pembahasan hukum ekonomi internasional tidak mudah atau sulit untuk dipahami tanpa memahami dengan baik teori ekonomi. Pendapat lain dari sarjana asal Amerika Serikat Louis Henkin:

all the international and international agreements governing economic transactions that cross state boundaries or otherwise have implications for more than one state, such as those involving movements of goods, funds, persons, intangibles, technology, vessels or aircraft.

Louis Henkin mendefinisikan hukum ekonomi internasional sebagai segala bentuk hukum internasional dan perjanjian internasional yang mengatur tentang transaksi ekonomi lintas batas negara atau memiliki implikasi pada lebih dari satu negara, seperti misalnya mempengaruhi perpindahan barang, uang, orang, teknologi, surat-surat maupun penerbangan.

2. Subyek Hukum Ekonomi Internasional

Pengertian subyek hukum ekonomi internasional menurut Asif Qureshi adalah setiap entitas (satu kesatuan sebagai subyek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban ekonomi berdasarkan sistem ekonomi internasional. Entitas atau subyek hukum ini menurut Qureshi memiliki

³⁰ Huala Adolf, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, CV Keni Media, Bandung, hlm. 5

personalitas yang telah diakui dalam ekonomi internasional. Pengakuan ini penting karena pengakuan tersebut memberinya kemampuan untuk melakukan perjanjian internasional di bidang ekonomi, kemampuan untuk menegakkan kesepakatan ekonomi internasional, dan kemampuan untuk ikut serta atau terlibat dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi.³¹

Doktrin yang mula-mula lahir pada awal abad ke-19 menganggap hanya negaralah sebagai subyek hukum internasional satu-satunya, individu dianggap bukanlah penanggung hak dan kewajiban yang lahir secara langsung dari hukum internasional. Apabila aturan-aturan hukum internasional melahirkan suatu hak yang memberi perlindungan kepada individu, maka ia hanya dapat memiliki atau mempertahankan haknya apabila ada dukungan dari negaranya.

Manakala individu melanggar ketentuan hukum nasional tersebut, ia dihukum atas pelanggaran hukum nasional itu sesuai dengan hukum internasional. Jika negara tersebut lalai atau tidak mengundang dalam ketentuan hukum misalnya atau apabila pengadilan negara tersebut tidak melaksanakan aturan-aturan hukum internasional, maka pada tingkat internasional akan berakibat lahirnya tuntutan-tuntutan oleh negara-negara lain.

Pada perkembangannya, terjadi perubahan-perubahan dalam pola hubungan internasional dari abad ke-abad sehingga sedikit banyak

³¹ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 53.

menggoyahkan doktrin lama tersebut. Hubungan-hubungan internasional juga hubungan ekonomi internasional dewasa ini tidak hanya didominasi oleh negara melainkan ada juga subyek-subyek lain yang dari waktu ke waktu aktif melakukan hubungan ekonomi internasional seperti orang perorangan (individu) yang kemudian memiliki kewenangan untuk mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan suatu konvensi atau perjanjian internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi 1965 yang mendirikan ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes*).

Diantara negara dan individu, terdapat pula subyek lain dalam hukum ekonomi internasional karena perkembangan sejarah, seperti perusahaan transnasional. Berikut ini dijelaskan secara lebih terperinci tentang beberapa subyek hukum ekonomi internasional seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

a. Negara

Negara adalah subyek hukum ekonomi internasional yang utama. Hubungan-hubungan ekonomi internasional banyak didominasi oleh peranan dan kebijakan negara di dalamnya.

Peran penting negara tampak pula dalam keanggotaan berbagai organisasi ekonomi internasional. Contohnya dalam GATT yang kemudian diambil alih oleh WTO, hanya negara saja yang berhak menjadi anggotanya. Selain itu dalam badan kelengkapan PBB di bidang ekonomi,

(misalnya ECOSOC atau UNCTAD) badan-badan tersebut hanya mensyaratkan negara sebagai aktor (subyek atau pelaku) yang menjadi anggotanya. Sedangkan dalam forum penyelesaian sengketa, terkadang aturan suatu lembaga penyelesaian sengketa juga mensyaratkan hanya negara saja yang dapat membawa sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa tersebut.

Pengertian negara dalam hukum ekonomi internasional juga mengacu kepada pengertian negara sebagaimana dikenal dalam hukum internasional. Hukum ekonomi internasional tidak memperhatikan apakah negara tersebut menganut suatu sistem ekonomi, politik, hukum, sosial atau sistem-sistem lainnya. Yang menjadi patokan utamanya adalah negara tersebut dalam mengadakan hubungan-hubungan ekonomi internasional harus independen, tidak bergantung kepada negara lain, atau tidak berada dalam kekuasaan negara lain.

Perhatian khusus lainnya dalam hukum ekonomi internasional adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi, biasanya hukum ekonomi internasional memberi pengaturan yang lebih meringankan negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*), negara kurang maju (*least developing countries*), dan negara yang berada dalam transisi.³²

³²*Ibid*, hlm. 57.

b. Individu

Individu dari konsepsinya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu individu dalam arti fisik (*physical or natural persons*) dalam arti perorangan dan sekumpulan pribadi hukum (*juristic persons*).

Sebagai subyek hukum ekonomi internasional yang terbatas kedudukannya, status individu bergantung kepada isi ketentuan perjanjian yang memberikan kedudukan tersebut. Berdasarkan hukum internasional klasik, individu mendapatkan kedudukannya dari aturan-aturan penting hukum kebiasaan internasional.

Kedudukan individu sebagai subyek hukum ekonomi internasional diatur dalam konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*) tahun 1965. Konvensi ini mengakui individu sebagai subyek hukum ekonomi internasional. Dalam hal ini kemampuan individu untuk membuat kontrak atau perjanjian penanaman modal dengan suatu negara.³³

c. Perusahaan Transnasional

Perusahaan transnasional sebagai subyek hukum ekonomi internasional sebenarnya dapat pula digolongkan ke dalam individu dengan arti *juridcal person* (badan hukum atau perusahaan). Namun perlakuan hukum terhadapnya perlu dibedakan dalam menggali subyek

³³*Ibid*, hlm. 61

hukum ekonomi internasional ini karena perusahaan transnasional memiliki personalitas yang lebih tinggi tingkatannya dari individu.³⁴

Perusahaan transnasional adalah istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dapat terlihat dalam draft yang dibuat oleh PBB dengan judul *Draft United Nations Code of Conduct on Transnasional Corporations*, yang dengan jelas menggunakan istilah transnasional corporation atau perusahaan transnasional. Meskipun demikian, para pakar ekonomi lebih sering menggunakan istilah *Multinational Enterprise* atau perusahaan multi nasional.³⁵

Berdasarkan apa yang telah disebutkan diatas, terdapat dua istilah antara perusahaan transnasional dan perusahaan multi nasional namun memiliki objek yang sama. Menurut Robert L Hulbroner, yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak diberbagai negara. Sementara dalam istilah perusahaan transnasional J. Panglaykim menyatakan bahwa perusahaan transnasional adalah suatu jenis perusahaan yang bekerja dan didirikan diberbagai negara, tetapi semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan.

Sementara itu menurut Sumantoro, perusahaan transnasional pada dasarnya mengacu pada sifat melampaui batas-batas negara, baik dalam

³⁴ *Ibid*, hlm. 63

³⁵ Juajir Sumardi, 2012, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*, Makassar, Arus Timur, hlm. 9.

pemilikan maupun dalam kegiatan usahanya. Sedangkan Helga Hernes menyatakan dalam satu tulisannya tentang perusahaan transnasional ini sebagai berikut:

*Multinational corporations are powerful organizations by virtue of their intergrated management, their control over large resources, their influence... the market, their role as employer, their role in the transfer of technology and their role as agents of development.*³⁶

Dengan memperhatikan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut diatas dengan menggunakan pendekatan struktural dari perusahaan transnasional itu sendiri, perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang produksi barang dan jasanya dilebih dari satu negara dan kegiatan operasionalnya tetap berdasarkan instruksi dari perusahaan induknya.

Pengaturan tentang perusahaan transnasional terdapat dalam Deklarasi Tata Ekonomi Internasional Baru yang dicanangkan sejak tahun 1974, di mana butir ke-4 menyatakan suatu ketegasan sikapnya tentang pengaturan kegiatan perusahaan transnasional sebagai berikut:

To regulate and supervise transnasional corporation by taking measure in the interest of the national economics of the countries where such corporation operate on the basis of full sovereignty of those countries.

³⁶ *Ibid.* Hlm 10-11

Selanjutnya dalam Bab II Pasal 2 (b) CERDS, diatur mengenai hak negara terhadap perusahaan transnasional, yaitu:

To regulate and supervise the activities for transnasional corporation within its national jurisdiction and take measures to ensure that such activities comply with its laws, sule and regulations and conform with its economic and social policies. Transnasional corporation shall not intervene in the internal affairs of a host state.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen Tata Ekonomi Baru seperti dikemukakan diatas, status hukum perusahaan transnasional diakui oleh hukum internasional juga sebagai subjek hukum nasional dimana perusahaan tersebut menjalankan operasinya. Ketegasan status hukum perusahaan transnasional sebagai subjek hukum dinegara dimana perusahaan tersebut beroperasi (*host country*).³⁷

Perusahaan transnasional merupakan suatu bentuk perusahaan yang memiliki pengetahuan luas serta bersifat universal tentang teknik-teknik produksi dan penjualan. Dengan kelebihan-kelebihan ini, maka perusahaan transnasional tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia.³⁸ Diantara berbagai faktor ekonomi yang mendorong globalisasi, peran perusahaan-perusahaan transnasional merupakan faktor yang paling penting.

³⁷ *Ibid*, hlm. 13-14

³⁸ *Ibid*, hlm 17

Pada dekade 1980-an dan 1990an, perusahaan transnasional berkembang sangat pesat dengan dibentuknya tiga pasar regional yang sangat berpengaruh: Eropa (pasar tunggal Eropa), Asia-Pasifik (Deklarasi Osaka pada tahun 2000 yang menjamin perdagangan yang bebas dan terbuka), dan Amerika Utara (persetujuan perdagangan bebas Amerika Utara). Sejak awal 1990-an, negara-negara lain juga menghapus hambatan-hambatan terhadap investasi asing. Menjelang peralihan abad ke-21 hampir semua kegiatan perekonomian dunia dikuasai oleh perusahaan transnasional.³⁹

Perusahaan transnasional jauh lebih kecil dimotivasi oleh dorongan kedaulatan nasional, sehingga mereka dapat mengadakan ikatan yang jauh lebih erat antar manusia dan perusahaan dari berbagai kebangsaan. Sebagai konsekuensi logis dari kecilnya dorongan kedaulatan nasional, maka dewasa ini telah banyak terbentuk perusahaan transnasional.

Peranan perusahaan transnasional di negara-negara industri dapat dilihat sebagai menyatunya berbagai ekonomi serta menambah ketergantungan antarnegara, sedangkan bagi negara sedang berkembang terdapat suatu laporan bahwa jumlah modal yang berasal dari perusahaan transnasional sudah lebih besar dibandingkan dengan modal yang datang dari negara-negara industri dan modal domestik.

³⁹ Pendidikanzone.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 04.23 WITA

Dengan mengandalkan berbagai keunggulan yang dimilikinya, perusahaan transnasional dapat berperan membantu pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara-negara sedang berkembang. Terdapat empat fungsi positif yang dimungkinkan dari keberadaan perusahaan transnasional, yaitu:⁴⁰

- 1) Selaku penanaman modal asing bagi negara-negara yang sedang membutuhkannya.
- 2) Merupakan pemasok teknologi ke negara tempat beroperasinya perusahaan transnasional tersebut.
- 3) Dapat berfungsi sebagai penyalur bantuan dari negara-negara maju maupun dari lembaga-lembaga internasional kepada negara-negara berkembang atau yang membutuhkannya.
- 4) Sebagai suatu tempat untuk mendapatkan keterampilan dalam bekerja, melalui suatu pengkaderan tenaga kerja dari negara di mana perusahaan tersebut beroperasi.

d. Organisasi Ekonomi Internasional

Organisasi merupakan suatu kebutuhan setiap anggota masyarakat, baik untuk skala lokal, nasional maupun internasional. Terlebih dalam era liberalisasi perdagangan yang semakin global, dimana peran organisasi internasional semakin signifikan bahkan dapat melebihi kewenangan suatu negara dalam beberapa hal. Terdapat dua golongan

⁴⁰ Juajir Sumardi, *Op.cit*, hlm. 17-19

besar mengenai bentuk organisasi ekonomi internasional. Pertama, organisasi ekonomi internasional yang secara khusus memiliki kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu. Contohnya organisasi seperti IMF, OPEC, WTO, dll. Kedua, organisasi ekonomi internasional, khususnya yang berada dalam sistem organisasi PBB, yang memiliki kompetensi mengatur aktivitas ekonomi internasional dan bidang-bidang lainnya, misalnya adalah UNCTAD.

Organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional memiliki konsekuensi yang cukup luas dalam hubungan internasional. Sebagai subyek hukum internasional memungkinkannya untuk berfungsi sebagai kesatuan hukum dalam lingkup internasional. Ia mampu untuk mengikuti dan menjadi peserta dalam perjanjian internasional. Ia dapat memberikan perlindungan kepada pegawainya, dan lain-lain.⁴¹

Di segi atau tahap integrasi ekonominya, organisasi ekonomi internasional dapat beraneka macam. Terdapat 5 bentuk tahap-tahap integrasi ekonomi yang dimaksud:

- 1) Tahap yang paling sederhana yaitu suatu organisasi yang bertujuan hanya untuk menetapkan sistem tarif *preferential multilateral*. Dalam tahap ini negara-negara anggota hanya menyepakati tingkat-tingkat tarif bagi produk-produk impor yang mereka sepakati.

⁴¹ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 74.

- 2) *Free Trade Areas* yaitu suatu organisasi ekonomi internasional yang berupaya secara bertahap menghapuskan semua tarif-tarif internal dan pembatasan-pembatasan kuantitatif, termasuk penghapusan rintangan atau hambatan kuota perdagangan terhadap negara-negara anggota lainnya. Setiap negara dalam kawasan perdagangan bebas ini tetap memiliki kebebasan untuk mengenakan bea-bea terhadap produk-produk yang berasal dari negara ketiga (non-anggota).
- 3) *Customs Unions*, dalam tahap ini organisasi tersebut menerapkan *Free Trade Areas* dan telah memiliki kesepakatan mengenai suatu tarif eksternal bersama. Untuk barang atau produk yang berasal dari luar kawasan, negara-negara anggota *customs unions* berkewajiban untuk mengganti ketentuan tarif bea masuk untuk seluruh kawasan. Tarif seragam yang berlaku di kawasan tertentu ini kadang-kadang disebut pula dengan "*Common External Tariff*" atau "*Common Outer Tariff*".
- 4) *Common Markets* yaitu tahap di mana suatu organisasi telah mampu melaksanakan *Customs Unions* dan memiliki koordinasi di bidang kebijakan moneter dan pajak. Dalam tahap ini, faktor-faktor produksi bagi suatu kegiatan ekonomi yakni buruh, modal, dan perusahaan memiliki kebebasan

untuk bergerak di dalam wilayah negara-negara anggota *Common Markets*.

- 5) Integrasi Ekonomi Penuh (*Total Economic Integrations*) atau kadang kala disebut pula dengan “*Economic Union*”, yaitu suatu organisasi yang telah memiliki kebijakan-kebijakan ekonomi yang seragam di antara negara-negara anggotanya.⁴²

C. ACFTA (*Asean Free Trade Agreement*)

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) merupakan kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Cina.⁴³

Cina sebagai negara berkembang di Asia yang perkembangan ekonominya yang cukup pesat membuat posisi Cina dalam perekonomian global dianggap penting. Selain itu, pasar Cina juga memiliki potensi yang besar sehingga akan saling menguntungkan apabila dapat dijalin kerjasama diberbagai sektor ekonomi. Cina memiliki kemampuan investasi

⁴² Huala Adolf, *ibid*, hlm. 75

⁴³ Direktorat Kerja Sama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, *ASEAN China Free Trade Area*. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%FTA.pdf>

yang tinggi, dan sebagai salah satu pemain dalam pasar global tentunya Cina membutuhkan tempat untuk merelokasi industri yang dinilai sudah tidak kompetitif lagi.

Strategi yang dilancarkan Cina dalam mewujudkan pembentukan dana negosiasi ACFTA dapat menjadi pelajaran bagi seluruh negara yang berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Hal penting yang harus dipahami adalah sebuah kerjasama tidak hanya ditunjukkan untuk mempererat hubungan politik antar negara, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara harus memiliki kesiapan agar kerjasama yang dibuat pada akhirnya tidak menjadikan negara sebagai keuntungan semata bagi negara lain. Keberhasilan Cina dalam negosiasi ACFTA telah memperlihatkan bahwa sikap terbuka dalam persaingan perdagangan bebas dan kooperatif terhadap kepentingan negara lain merupakan faktor utama dalam pencapaian kesepakatan sebuah kerjasama.

Pemerintah mengungkapkan, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas di tengah kondisi industri yang masih lemah berpotensi mendorong munculnya ancaman arus barang impor yang semakin luas. Peluang timbulnya resiko sangat besar mengingat daya saing industri dalam negeri masih sangat buruk, sistem perbankan yang belum mendukung pengembangan sektor riil (industri), tingginya harga dan terbatasnya pasokan bahan baku produksi industri. Jadi bisa juga

dikatakan bahwa perdagangan bebas ASEAN-China berdampak pada rusaknya industri lokal di Indonesia karena kalah saing dengan Cina.⁴⁴

Di era globalisasi yang semakin maju ini, semua masyarakat selalu menginginkan barang-barang atau kebutuhan yang mudah didapatkan dipasaran dan yang terpenting lagi masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang bersifat instan, kebutuhan selalu berkaitan dengan jual beli, dan proses jual beli tidak terlepas dari pasaran, semakin banyaknya permintaan masyarakat, semakin banyak pula berbagai macam produk-produk yang dikeluarkan dipasaran, hingga terjadi persaingan antar negara yang menyebabkan timbulnya perdagangan bebas atau pasar bebas.

Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas harus dilakukan mulai dari kebijakan birokrasi politiknya, peraturan perundang-undangnya, aparat pemerintah dan para pelaku usaha. Dalam perjalanannya, pemerintah setelah melakukan ratifikasi perjanjian ACFTA, Indonesia belum sepenuhnya memberikan regulasi dan aturan yang dapat menjaga serangan barang dari luar masuk ke dalam negeri sehingga regulasi yang dibuat belum serius dalam memberikan perlindungan karena banyak barang yang masuk tak terbandung, sehingga mematikan dan menggusur produk lokal yang ada juga pertanian.

⁴⁴ Pendapat ini dikemukakan MS Hidayat sewaktu menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. ([http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content &task-view&id385&itemid=1](http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id385&itemid=1) yang diakses pada tanggal 16 Desember 2016)

Beberapa fakta menunjukkan sebagai berikut; perdagangan bebas akan menjamin harga pangan murah dan mencegah kelaparan, kenyataannya justru meningkatnya harga pangan. Suatu yang ironi, di Amerika dan negara maju lainnya semakin banyak orang meninggal karena obesitas, sementara di negara miskin kesulitan memperoleh sembako, WTO dan TNC berpandangan akan memproduksi pangan yang aman dengan mencantumkan aspek dan pertimbangan keselamatan lingkungan dalam ketentuan WTO, namun yang terjadi adalah penggunaan pestisida yang berlebih, rekayasa genetika produk pangan justru membahayakan kesehatan manusia dan mengganggu keseimbangan ekologis. Dilain hal, bahkan yang lebih mengerikan, hak ekonomi dan hak komersial negara berkembang semakin ditelikung sebagaimana kasus Kopi Gayo. Suku Gayo di Nangroe Aceh Darussalam dikagetkan dengan Perusahaan Belanda yang bernama *Holland Coffee* yang mengklaim merek Kopi Gayo dan memperingatkan untuk tidak menggunakan merek dagang tersebut karena telah mendaftarkannya sebagai "*Gayo Mountain Coffee*". Sebagai konsekuensinya eksportir kopi dari Gayo tidak dapat mengekspor komoditas tersebut dengan menggunakan merek Gayo. Demikian juga Kopi Toraja telah didaftarkan oleh Pengusaha Jepang.⁴⁵

Akibat yang ditimbulkan seperti ini mendorong pemerintah untuk melakukan strategi demi menyelamatkan industri-industri dalam negeri

⁴⁵ Sosialisai Direktorat Jenderal HKI tentang Pentingnya Merek dan Indikasi Geografis di Sejumlah Daerah di Indonesia, Bisnis Indonesia, 21 Januari 2008.

salah satunya dengan melakukan peningkatan daya saing, memproteksi produk dalam negeri sehingga produk-produk impor tidak menguasai pasar dalam negeri dan mampu menciptakan peluang yang lebih besar untuk produk-produk dalam negeri menguasai pasar sendiri serta mengambil kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

Dalam proses kebijakan tidak hanya dalam memberikan batasan atau pengetatan barang masuk atau barang import, melainkan dalam memacu industri atau produk lokal untuk menjadikan peningkatan produksi dan instrumen politik luar negeri dalam menjadikan Indonesia semakin berkembang, sehingga instrumen politik luar negeri dapat membantu dalam eksistensi dan perkembangan produksi lokal, sedangkan bila tidak siap dengan kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah yang menjadi senjata utama, maka produk lokal kita akan banyak yang gulung tikar dan bangkrut sehingga tidak bisa meningkatkan keseimbangan ekspor dan impor dari ACFTA.

Keseimbangan impor dan ekspor dilakukan agar tidak menjadikan Indonesia kalah dalam jumlah perdagangan, tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah negara Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia tidak sekedar menjadi pasar melainkan untuk menjadi negara produsen dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Keberadaan perdagangan bebas melalui ACFTA menjadikan pemikiran mengenai bagaimana pengaturan hukum internasional di dalam perjanjian ekonomi ACFTA, dimana keberadaan ACFTA bagi Indonesia bukan hanya sekedar tantangan melainkan usaha serta perjuangan keras untuk tetap bersaing di era perdagangan bebas.

Kebijakan luar negeri yang timbul akibat ratifikasi perjanjian internasional ACFTA harus diimbangi dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia, karena negara wajib melindungi kepentingan warga negaranya. Istilah perjanjian internasional merujuk pada interaksi antar negara dalam menyelesaikan berbagai masalah atau konflik kepentingan diberbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (militer).⁴⁶ Selain itu perjanjian internasional pula yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan (hubungan) ekonomi negara-negara.

Alasan masyarakat internasional lebih suka mengadakan perjanjian internasional adalah karena cara ini memang cara yang paling cocok untuk menciptakan hak dan kewajiban di bidang ekonomi internasional. Perjanjian dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama dari negara-negara anggotanya. Dari kesepakatan ini pula lahir kewajiban (internasional) dari negara yang telah sepakat untuk melaksanakannya.

⁴⁶ Pengantar Hukum Internasional, Penulis: Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, Penerbit: Alumni

Pengaturan internasional yang mengatur masalah perjanjian ini secara umum diatur oleh Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional tahun 1969. Konvensi ini memuat seperangkat peraturan komprehensif mengenai pembentukan, penafsiran dan pengakhiran perjanjian.⁴⁷ Sedangkan dari segi hukum nasional Indonesia yang mengatur perjanjian internasional adalah UU Nomor 24 tahun 2000. Menurut UU ini, perjanjian internasional adalah *“perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”* Pada prinsipnya definisi ini sama dengan definisi dalam Konvensi Wina 1969.

Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/ atau materi permasalahan yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait.

⁴⁷ Huala Adolf, *op.cit*, hlm. 16

D. Perdagangan Bebas

Perjanjian ACFTA merupakan perjanjian yang poin pentingnya adalah terjadinya perdagangan bebas secara bilateral, keberadaan perdagangan bebas yang terjadi antara China dan ASEAN merupakan faktor penting dalam kerjasama tersebut. Perdagangan bebas merupakan suatu kondisi pertukaran barang dan jasa antar negara yang berlangsung tanpa adanya hambatan ekspor impor, tetapi walaupun ada hambatan, maka jumlah dan tingkatannya harus minimal. Dalam hal ini yang disebut dengan hambatan adalah pajak, kuota ekspor dan impor, peraturan negara tentang proteksi dan peraturan lain yang sekiranya dapat menghambat perdagangan antar negara tersebut.

Perdagangan bebas adalah suatu proses penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan oleh pemerintah) dalam perdagangan antar individu-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada dinegara yang berbeda.⁴⁸

Dalam perdagangan bebas ini dilakukan dengan meminimalisir bahan menghilangkan sama sekali segala hambatan yang ada dan timbul pada perdagangan bebas yang terjadi pada negara eksportir dan importir, sehingga barang mudah masuk kesuatu negara dengan hambatan yang

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375&itemid=29
diakses pada tanggal 16 Desember 2016

minim untuk pelaksanaannya, dan menjadikan biaya masuk menjadi ringan dan kecil. Hambatan non-tarif merupakan kebijakan yang dapat menimbulkan distorsi akan perdagangan bebas dan mengurangi potensi dari perdagangan bebas internasional itu sendiri.

E. Prinsip – Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China

Untuk bisa terwujudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah mematuhi prinsip-prinsip dasar dari kerjasama ini yaitu :

a. Asas timbal balik (*Principle of Reciprocity*);

Menurut Kerangka Perjanjian, Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi menganut asas timbal balik (*principle of reciprocity*). Dan pada Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang disepakati bahwa penurunan tarif pada produk-produk yang telah disepakati harus menggunakan asas timbal balik dan saling menguntungkan para Pihak.

b. Aturan tentang Asal Barang (*Rules of Origin*);

Pembentukan wilayah perdagangan bebas, khusus di dalam Perdagangan Barang (*trade in goods*) memerlukan adanya suatu pengaturan/ketentuan untuk menetapkan negara asal suatu barang yang diperdagangkan, Ketentuan asal barang dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai untuk peruntukannya, yaitu ketentuan asal barang preferensi dan ketentuan asal barang bukan preferensi. Ketentuan asal barang preferensi diperuntukkan untuk menetapkan apakah suatu barang memenuhi syarat

untuk memanfaatkan suatu preferensi atau tidak. Sedangkan ketentuan asal barang bukan preferensi adalah ketentuan yang diperuntukkan untuk membuktikan negara asal barang dari suatu barang.

Dalam perkembangannya, di beberapa negara di dunia telah menetapkan ketentuan asal barangnya dan ketentuan ini disyaratkan kepada setiap barang yang memasuki wilayah pabeannya serta menjadi salah satu persyaratan impor yang harus dipenuhi apabila barang tersebut memasuki negaranya. Peraturan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan ketentuan asal barang tidak boleh menentukan persyaratan yang ketat yang tidak wajar atau menuntut untuk dipenuhinya persyaratan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan proses pengolahan atau produksi barang sebagai prasyarat untuk menentukan negara asal barang.

Pada umumnya setiap ketentuan asal barang harus mempunyai tiga unsur utama, yaitu :

- 1) Kriteria asal barang;

Ini merupakan kriteria untuk menetapkan bahwa suatu barang baru dianggap benar-benar berasal dari suatu negara apabila telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan untuk barang tersebut.

- 2) Persyaratan pengiriman;

- 3) Bukti dokumen.

Untuk mengetahui bahwa suatu barang benar-benar berasal dari suatu negara yang telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan terhadap barang tersebut, maka diperlukan suatu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal barang yang lazim disebut dengan Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate of Origin/COO*) yang akan menyertai barang ekspor bersama-sama dengan dokumen ekspor lainnya, seperti *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB) atau *Cargo Receipt* dan sertifikat kesehatan (*Health Certificate*, apabila dipersyaratkan)⁴⁹.

Dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga diatur mengenai ketentuan asal barang atau *Rules of Origin* (ROO). Mengenai ROO ini diatur di dalam Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang. Untuk mendapatkan preferensi penurunan tarif harus disepakati dengan Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin* (ROO) dengan ketentuan kandungan lokal kawasan perdagangan bebas ASEAN-China sebesar 40% yang secara operasional menggunakan SKA Form E. Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN-China, bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan *Rules of Origin* di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang dapat memperoleh kelonggaran tarif.

⁴⁹ Murad Purba, *Peranan Ketentuan Asal Barang dalam Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Edisi V 2008), hlm 33-42.

c. Prinsip dasar atau klausul *Most – Favoured – Nation* (MFN);

Pada pokoknya, klausul MFN ini merupakan prinsip non-diskriminasi di antara negara anggota. Menurut prinsip ini, suatu kebijakan perdagangan yang harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Semua anggota Perjanjian terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor dan impor, serta biaya-biaya lainnya⁵⁰. Pada umumnya, klausul ini, mempunyai dua bentuk yaitu⁵¹:

1) MFN bersyarat

Menurut prinsip ini, apabila suatu negara memberi keistimewaan pada negara ketiga, maka ia diwajibkan memberikan perlakuan yang sama kepada negara partnernya⁵².

2) MFN tidak bersyarat

Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberikan keistimewaan kepada suatu negara ketiga, tanpa syarat memberikan keistimewaan kepada negara partnernya⁵³.

Klausul MFN ini, dapat terlihat pada penurunan tarif bea masuk pada perdagangan bebas ASEAN-China. Menurut pasal 9 Kerangka Perjanjian dinyatakan bahwa Cina harus menyetujui perlakuan MFN yang konsisten dengan peraturan dan ketentuan WTO terhadap seluruh

⁵⁰ Huala Adolf, *op.cit*, hlm 108.

⁵¹ Huala Adolf, *op.cit*, hlm 31.

⁵² *ibid*, hlm 31

⁵³ *ibid*, hlm 31 dan lihat juga N. Rosyidah Rakhmawati, *ibid*, hlm 65.

negara-negara anggota ASEAN yang bukan pihak-pihak dalam WTO⁵⁴. Pada prinsip MFN ini, menentukan bahwa setiap keuntungan, bantuan, dan hak istimewa yang diberikan oleh suatu negara peserta terhadap setiap barang yang berasal dari ataupun yang ditujukan kepada suatu negara harus diberikan juga kepada seluruh peserta lainnya⁵⁵.

d. Asas National Treatment;

Dalam perdagangan bebas ASEAN-China dianut juga asas *National Treatment*. Asas ini dianut pada Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi. Menurut asas ini, negara harus memperlakukan barang-barang, jasa-jasa atau modal yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan cara yang sama. Prinsip ini seringkali diterapkan bersamaan dengan asas timbal balik (*principle of reciprocity*)⁵⁶. Hal ini dapat terlihat pada perjanjian-perjanjian yang ditandatangani pada perdagangan bebas ASEAN-China, yang menerapkan prinsip *national treatment* bersamaan dengan asas timbal balik (*principle of reciprocity*).

e. Prinsip Preferensi;

Prinsip ini mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara sedang berkembang.

⁵⁴ Menurut Pasal 9 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* : "China shall accord Most Favoured Nation (MFN) Treatment consistent with WTO rules and disciplines to all the non-WTO ASEAN member states upon the date of signature of this agreement."

⁵⁵ Huala Adolf, *op.cit*, hlm 31

⁵⁶ *Ibid*, hlm 30.

Dasar dari prinsip ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban *Most – Favoured – Nation* (MFN) untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tingkat tarif pada impor-impor barang jika barang-barang tersebut berasal dari negara-negara sedang berkembang⁵⁷. Dan prinsip terlihat dari penerapan penurunan dan penghapusan tarif yang diatur di dalam Kerangka Perjanjian, Perjanjian Perdagangan Barang. Prinsip ini dianut dalam mekanisme penurunan dan penghapusan tarif dalam rangka kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, baik itu melalui mekanisme EHP, *Normal Track Programme* (Jalur Normal), dan *Sensitive and Highly Sensitive* (Jalur Sensitif). Menurut mekanisme tersebut, negara-negara anggota ASEAN yang baru (Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja) diberi kelonggaran terhadap aturan-aturan hukum untuk penurunan dan penghapusan tarif bea masuk.

f. Prinsip Transparansi;

Prinsip ini mensyaratkan diterbitkannya atau diumumkankannya semua peraturan hukum yang berlaku umum baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah⁵⁸. Prinsip transparansi ini terdapat dalam Pasal 4 Perjanjian Perdagangan Barang, dan dalam Pasal 17 Perjanjian Investasi.

⁵⁷ Ibid, hlm 40-41

⁵⁸ Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 38.

g. Larangan Terhadap Restriksi Kuantitatif.

Menurut prinsip ini adanya larangan terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan lainnya⁵⁹. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Perdagangan Barang

⁵⁹ Syahmin, AK, Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis memilih tiga lokasi penelitian, yaitu:

1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berwenang di bidangnya.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, Jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet.

Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis pengaturan hukum internasional di dalam perjanjian kerjasama ekonomi ACFTA dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Pustaka (*Literature Research*), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), teknik ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*). Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga tercapai tujuan-tujuan dari penelitian ini.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Internasional mengenai Kerjasama Ekonomi ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement).

Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu suatu kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan Cina. Untuk membentuk suatu kawasan bebas diperlukan landasan hukumnya. Untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, para kepala negara anggota ASEAN dan Cina mengadakan pertemuan di Bandar Sri Begawan, pada tanggal 6 Nopember 2001 Brunei Darussalam untuk menandatangani *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation* dan pendirian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China.

Adapun titik awal dari kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ini, pada tanggal 4 Nopember 2002 di Phonm Penh, Kamboja ditandatanganinya perjanjian *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* atau yang di dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan Kerangka Perjanjian.

Pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia ditandatangani Protokol perubahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* yaitu *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive*

Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China.

Pada tanggal 29 Nopember 2004 di Vientiane, Laos ditandatangani *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* atau yang di dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut Perjanjian Perdagangan Barang⁶⁰ dan *Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement*. Lalu pada Januari 2007 di Cebu, Filipina, *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Perdagangan Jasa⁶¹) yang ditandatangani pada ke-12 KTT ASEAN.

Pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand ditandatangani *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Investasi) pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN. Perubahan pada Perjanjian Perdagangan Barang yaitu *Second Protocol to*

⁶⁰ Menurut Huala Adolf yang dimaksud dengan perdagangan barang yaitu pergerakan barang-barang secara lintas batas negara. Lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 5.

⁶¹ Menurut Huala Adolf. Adapun yang dimaksud dengan perdagangan jasa yaitu pergerakan jasa-jasa secara lintas negara melalui transaksi-transaksi yang melintasi batas-batas negara (misalnya jasa telekomunikasi), juga pergerakan lintas batas konsumen-konsumen jasa (misalnya pariwisata). Lihat Huala Adolf, *ibid*.

Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China ditandatangani pada 29 Oktober 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia⁶². Dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU)⁶³, yaitu *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assesment* yang ditandatangani di Thailand 25 Oktober 2009, dan *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual Property* yang ditandatangani Thailand 21 Desember 2009.

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam perdagangan bebas ASEAN-China yaitu sebagai berikut:⁶⁴

⁶² Lihat *ASEAN-China Free Trade Area*, diakses dari situs Kementerian Perdagangan Republik Indonesia <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20%20China%20FTA>

⁶³ Dalam praktik di negara-negara *common law system*, MOU adalah *non-legally binding* yang berarti menganggap bahwa MOU hanyalah dokumen yang hanya memuat komitmen politik dan moral. Di Indonesia sendiri, dari perspektif politis, MOU itu menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang tidak ruwet serta tidak terlalu mengikat. Lihat Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 33-37.

⁶⁴ Lihat <http://www.aseansec.org/19105.htm>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017 jam 21.50 WIB.

No	Nama Perjanjian	Penandatanganan Perjanjian
1	<i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China</i>	Phnom Penh, 4 November 2002
2	<i>Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Bali, 6 October 2003
3	<i>Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Vientiane, 29 November 2004
4	<i>Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Vientiane, 29 November 2004
5	<i>Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Cebu, Filipina, 14 Januari 2007
6	<i>Agreement on Investment of the Framework</i>	Bangkok,

	<i>Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	15 August 2009
7	<i>Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment</i>	Thailand, 25 Oktober 2009
8	<i>Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual Property</i>	Thailand, 21 Desember 2009
9	<i>Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Kuala Lumpur, 29 Oktober 2010

Hubungan kerjasama antara ASEAN-China secara informal telah dimulai pada tahun 1991, dimana H.E. Qian Qichen yang merupakan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Cina (RRC) menghadiri *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* ke-24 pada bulan Juli 1991 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat itulah Cina memperlihatkan rasa ketertarikannya

untuk melakukan suatu kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi anggota ASEAN maupun Cina . Dan pada saat AMM ke-29 di Jakarta tahun 1996, Cina dikukuhkan menjadi mitra wicara penuh ASEAN⁶⁵. Perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dan Cina mulai meningkat pesat pada abad ke-21, dimana hal ini dipengaruhi karena bergabungnya Cina ke dalam World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001.

Komitmen perjanjian ini berlanjut dengan diratifikasinya *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui keputusan Presiden No.48 Tahun 2004 pada 15 Juni 2004 oleh Indonesia. Dalam perjanjian ini menyepakati pelaksanaan liberalisasi penuh pada tahun 2010 terhadap enam warga negara ASEAN termasuk Indonesia dan Cina. Menyusul Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar pada tahun 2015.

1. Pengaturan Pemberlakuan Kerjasama Ekonomi ASEAN-China FTA

Dalam pengaturan pemberlakuan kerjasama ekonomi ASEAN-China FTA, para pihak sepakat untuk memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tariff dan non tariff dalam semua perdagangan barang;

⁶⁵ <http://www.aseansec.org/5874.htm> , diakses pada 22 Mei 2017 jam 21.51 WIB.

- b. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sector yang signifikan;
- c. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China;
- d. Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk negara-negara anggota ASEAN yang baru;
- e. Ketentuan fleksibilitas bagi para pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitive dalam sektor-sektor barang, jasa, dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;
- f. Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan;
- g. Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor-sektor/bidang-bidang yang telah disepakati; dan

- h. Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektifitas bagi implementasi perjanjian ini.

2. Kesepakatan Dalam Perjanjian Kerjasama Ekonomi ASEAN-China FTA

Pada perjanjian ACFTA disepakati beberapa persetujuan perdagangan diantaranya:

- a. Persetujuan Perdagangan Barang

Penurunan tariff dalam rangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu:

- 1) *Early Harvest Programme* (EHP)

Dalam pengaturan perdagangan barang yang terdapat pada pasal 6 perjanjian kerjasama ekonomi ASEAN-China FTA, diatur mengenai *Early Harvest Programme* yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2004 dan diturunkan secara bertahap menjadi 0% pada tahun 2006, para pihak sepakat untuk menegosiasi pajak dan pengaturan perdagangan lainnya. Adapun cakupan produk yang termasuk dalam EHP yaitu (01. *Live Animals*; 02. *Meat and Edible Meat Offal*; 03. *Fish*; 04. *Daily Products*; 05. *Other Animal Products*; 06. *Live Trees*; 07. *Edible Vegetables* dan 08. *Edible Fruits and Nuts*) dengan pengecualian *Sweet Corns* (HS 07 10 40000). Selain itu untuk menyeimbangkan nilai ekspor Indonesia dan Cina terhadap produk-produk di atas, disepakati produk-produk EHP yang dinegosiasikan secara bilateral sebanyak 47 pos tariff (10 digit) antara lain Kopi, Minyak Kelapa (Kopra), Lemak dan minyak hewani, *margarine*,

Bubuk Kakao (HS 1805. 10. 00.00), Sabun, perabotan dari rotan dan *Stearic Acid*. Dari beberapa produk dalam EHP mengalami pelonjakan nilai ekspor Indonesia ke Cina yang sangat nyata yaitu antara lain Maniok (HS 0714); Fish Frozen (HS 0303); Kopra dan turunannya, (HS 1513); *Margarine* (HS 1517); *Glass envelope* (HS 7011) Dalam program pengurangan atau penghapusan tariff berdasarkan pasal 3 perjanjian kerjasama *ASEAN-China FTA*.

2) *Normal Track* (jalur normal)

Program penurunan tarif bea masuk antara ASEAN dan Cina yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2005 dengan cakupan produk ekspor Indonesia ke Cina diantaranya produk *Coal* (HS 2701); *Polycarboxylic acids* (HS 2917); *Wood* (HS 4409); *Copper wire* (HS 7408) dan diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 0% pada tahun 2010 dengan pengecualian sejumlah pos tarif yang dapat diturunkan menjadi 0% pada tahun 2012. Program ini dikelompokkan dalam 5 kelompok tarif yang dilakukan melalui 4 tahapan dan *sensitive track* yang terdiri dari 2 jenis yaitu *sensitive* dan *highly sensitive*.

Sensitive Track merupakan program penurunan tarif bea masuk antara ASEAN dan Cina yang dilakukan lebih lambat dari *Normal Track*. Sesuai kesepakatan, produk yang masuk dalam *Sensitive Track* memiliki tarif maksimum 20% pada tahun 2012 dan diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 5% pada tahun 2018, sedangkan tarif bea masuk produk *highly sensitive track* tidak boleh melebihi 50% pada tahun 2015.

Produk Indonesia yang oleh Cina dimasukkan dalam *Sensitive dan Highly Sensitive* antara lain *Palm Oil* dan turunannya (HS 1511); Karet Alam (HS 4001); *Plywood, vennered panels* (HS 4412). Sebaliknya, Indonesia juga memasukkan produk-produk unggulan ekspor Cina ke Indonesia antara lain barang jadi kulit; tas; dompet; alas kaki: sepatu sport, casual, kulit; kacamata; alat musik; tiup, petik, gesek; mainan: boneka; alat olah raga; alat tulis; besi dan baja; spare part; alat angkut; glokasida dan alkaloid nabati; senyawa organik; antibiotik; kaca; barang-barang plastik; produk pertanian, seperti beras, gula, jagung dan kedelai; produk industri tekstil dan produk tekstil (ITPT); produk otomotif; produk *ceramic tableware*.

3) Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA)

Pengaturan surat keterangan asal barang atau *Rules of Origin* yang mengharuskan eksportir untuk menggunakan form E SKA agar mendapat konsesi tarif ACFTA.

b. Persetujuan Perdagangan Jasa

Dengan adanya persetujuan para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus *national treatment* untuk sektor dan subsector yang dikomitmenkan oleh masing-masing pihak ACFTA.

c. Persetujuan investasi

Melalui persetujuan investasi, pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan Cina secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan

fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama di bidang investasi.⁶⁶

d. Kerjasama ekonomi

Dalam bidang kerjasama lainnya, para pihak dalam perjanjian kerjasama ekonomi ASEAN-China FTA sepakat untuk memperkuat kerjasama mereka dalam 5 sektor prioritas (utama) seperti pertanian (*agriculture*), Teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*), Pengembangan sumberdaya manusia (*human resources development*), Investasi (*investment*); dan Pengembangan sungai Mekong (*Mekong River basin development*), perbankan, keuangan, transportasi, industry, telekomunikasi, pertambangan, energy, perikanan, kehutanan, produk-produk hutan, dan sebagainya.

3. Pemberlakuan Prinsip *Most Favoured Nation Treatment*

Dalam pelaksanaan perdagangan bebas dalam konsep ASEAN-China FTA terkandung prinsip hukum ekonomi internasional dimana suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor serta ekspor tanpa syarat, perlakuan yang sama itu baik terhadap barang, jasa, ataupun modal yang dimiliki perusahaan asing ataupun warga negara asing yang melakukan suatu perdagangan dalam

⁶⁶ <http://wp.me/p1fqEk-4u> diakses pada 25 Juli 2017 pukul 10.01 WITA

wilayah negara dengan barang, jasa, dan modal yang dimiliki oleh warga negaranya sendiri. John. H. Jakson mengemukakan:

“The basic rationale for MFN is that if every country observes the principle, all countries will benefit in the long run through the resulting more efficient use of resource. Furthermore, if the principle is observed, there is less likelihood of trade disputes”.

Maka pemberlakuan prinsip ini dilakukan jika setiap negara patuh terhadap prinsip MFN, maka semua negara akan mendapatkan manfaatnya untuk jangka waktu panjang.

4. Penyelesaian Sengketa dan Negosiasi

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian ACFTA dimana para pihak harus membentuk prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa sejak 1 tahun setelah tanggal berlakunya persetujuan guna mencapai penyelesaian sengketa dalam persetujuan ini. Dalam hal negosiasi, pihak atau lembaga yang menangani penyelesaian sengketa terhadap perjanjian ACFTA yang telah ditetapkan dalam ketentuan perjanjian ini ialah Komite Negosiasi Perdagangan ASEAN-China (*The ASEAN-China Trade Negotiation Committee/ASEAN-China TNC*) yang ditetapkan dalam program negosiasi persetujuan kerjasama ACFTA. ASEAN-China TNC harus melaporkan secara rutin kepada para menteri ekonomi ASEAN (*the ASEAN Economic Ministers – AEM*) dan Menteri dari Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi Cina (*the Minister*

of the Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation-MOFTEC), melalui pertemuan-pertemuan SEOM dan MOFTEC, mengenai kemajuan dan hasil dari negosiasinya.

B. Pengaruh Perdagangan ACFTA terhadap Ekspor dan Impor Indonesia-Cina.

1. Realisasi Ekspor-Impor Indonesia ke Negara Tujuan

Tabel realisasi ekspor Indonesia ke negara tujuan periode 2012-2016⁶⁷

NO	NEGARA	NILAI (USD)				JAN-NOV		PERUB(%)	TREND(%)
		2012	2013	2014	2015	2015	2016	16/15	11-15
1	KOREA SELATAN	15,049,860,022	11,422,476,224	10,601,096,827	7,664,446,193	7,065,734,892	6,327,570,042	-10.45	-18.93
2	REP.RAKYAT CINA	21,659,502,663	22,601,487,232	17,605,944,452	15,046,433,777	13,661,640,466	14,749,996,378	7.97	-12.56
3	INDIA	12,496,314,269	13,031,302,738	12,248,960,308	11,731,001,068	10,850,782,945	9,170,525,633	-15.49	-2.48
4	AUSTRALIA	4,905,413,057	4,370,482,145	4,948,373,726	3,702,307,561	3,444,596,038	2,998,363,007	-12.95	-6.95
5	SELANDIA BARU	441,009,779	469,513,125	481,417,509	436,253,623	406,016,005	322,993,290	-20.45	-0.07

⁶⁷ Sumber : BPS (diolah Pusdatin Kementerian Perdagangan)

NERACA PERDAGANGAN DENGAN NEGARA MITRA DAGANG**INDONESIA - REP. RAKYAT TIONGKOK, Periode 2011-2016 (Juta US\$)**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Trend(%) 2011- 2015	Jan-Okt		Perub.(%) 2016/2015
							2015	2016	
TOTAL TRADE	49.153,2	51.045,3	52.450,9	48.230,3	44.457,3	-2,54	36.478,3	37.399,3	2,53
MIGAS	2.101,2	1.219,3	1.598,9	1.309,6	1.971,8	-0,55	1.614,9	1.498,1	-7,23
NON MIGAS	47.052,0	49.826,0	50.852,0	46.920,6	42.485,5	-2,61	34.863,4	35.901,7	2,98
EKSPOR	22.941,0	21.659,5	22.601,5	17.605,9	15.046,4	-9,97	12.446,1	12.827,7	3,07
MIGAS	1.345,4	795,4	1.319,9	1.146,9	1.785,7	9,77	1.439,0	1.406,3	-2,27

NON MIGAS	21.595,6	20.864,1	21.281,6	16.459,1	13.260,7	-11,42	11.007,1	11.421,4	3,76
IMPOR	26.212,2	29.385,8	29.849,5	30.624,3	29.410,9	2,75	24.032,2	24.572,1	2,25
MIGAS	755,8	423,8	279,0	162,8	186,1	-31,34	175,1	91,2	-47,83
NON MIGAS	25.456,4	28.961,9	29.570,4	30.461,6	29.224,8	3,32	23.856,2	24.480,4	2,62
NERACA	-3.271,2	-7.726,3	-7.248,0	-13.018,4	-14.364,4	41,64	-11.586,1	-11.744,4	-1,37
MIGAS	589,7	371,6	1.040,1	984,1	1.599,7	34,58	1.263,0	1.314,6	4,08
NON MIGAS	-3.860,8	-8.097,9	-8.288,9	-14.002,5	-15.964,1	40,31	-12.849,1	-13.059,0	-1,63

Sumber: BPS, *Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade*

Catatan: nilai ekspor dihitung secara FOB, sedangkan nilai impor dihitung secara CIF (FOB + Cost Insurance and Freight)

Tabel Perbandingan Ekspor dan Impor Indonesia-Cina

Variabel	Periode Januari – Oktober		Keterangan
	2015	2016	
Ekspor	12.446.116.339	12.827.738.779	mengalami kenaikan sebesar 0,029749783%
Impor	24.032.173.745	24.572.137.069	Mengalami kenaikan sebesar 0,21974618

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekspor Indonesia ke Cina jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor Indonesia dari Cina. Ini menunjukkan bahwa kemampuan produk-produk hasil Cina ke pasar Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan produk-produk hasil Indonesia ke pasar Cina. Dalam konteks ini, pemberlakuan ACFTA dikhawatirkan akan mendorong peningkatan produk-produk Cina ke pasar Indonesia. Dalam hal ini, berdasarkan data di atas dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, karena eksploitasi Cina terhadap Indonesia, karena memanfaatkan pasar Indonesia untuk mendistribusikan barang produksi Cina.

2. Keuntungan dari Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) bagi Indonesia

- a. Mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia;

Dengan adanya kawasan perdagangan bebas yang merupakan bagian dari perdagangan internasional, maka setiap negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri⁶⁸. Begitu juga gara Indonesia, dengan adanya perdagangan bebas ASEAN-China, maka Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diproduksi. Begitu juga sebaliknya, maka Cina juga membutuhkan negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Sehingga terjadilah ekspor dari Indonesia ke Cina, maka dengan itu secara tidak langsung mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Dampak positifnya dari kegiatan ekspor yang dilakukan pelaku usaha Indonesia yaitu meningkatnya ekspor/pangsa pasar dunia dari negara Indonesia⁶⁹. Apalagi para pengusaha Indonesia, terkadang tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat Produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Maka dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produksi tersebut ke luar negeri⁷⁰.

⁶⁸ Pendapat dari Sadono Sukirno yang dikutip dari tulisan Yani Mulia Banjarsari yang berjudul *Keterkaitan Hukum Internasional Dalam Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Perdagangan Internasional* yang diterbitkan oleh Bulletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Edisi 53 Tahun 2008.

⁶⁹ Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm 25.

⁷⁰ Lihat Tulus T.H. Tambunan, *op.cit*, hlm 25.

Salah satu perjanjian yang ditandatangani dalam perdagangan bebas ASEAN-China yaitu Perjanjian Perdagangan Jasa, salah satu yang diatur dalam Perjanjian Perdagangan Jasa yaitu sektor pariwisata⁷¹. Dengan adanya Perjanjian Perdagangan Jasa ini, Indonesia dapat lebih memajukan sektor pariwisata. Penghasilan dari pariwisata merupakan sumber devisa, penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi.⁷²

b. Meningkatkan devisa negara;

Dengan meningkatnya perdagangan luar negeri, penanaman modal atau investasi maka akan dapat meningkatnya devisa negara Indonesia. Karena kawasan perdagangan bebas ASEAN-China mendorong pertumbuhan ekonomi dengan dipermudahnya ekspor produk-produk asal Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN dan Cina karena tidak adanya hambatan baik dari segi tariff maupun non-tarif, serta adanya perjanjian tentang investasi.

Kegiatan ekspor baik barang dan jasa, investasi, pariwisata yang merupakan sumber devisa negara akan mudah dilakukan karena adanya perdagangan bebas ASEAN-China. Karena kesemua hal di atas telah diatur di dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China.

⁷¹ Pasal 7 ayat 2 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co- Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

⁷² Amir M.S., *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*, (Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM, 2000) hlm 101, dan lihat juga I Putu Gelgel I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 24.

c. Menciptakan persaingan;

Tidak ada suatu negarapun yang dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksinya sendiri. Begitu juga negara Indonesia, tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri dari hasil produksi sendiri⁷³. Jadi adanya ketergantungan suatu negara pada negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan memperhatikan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya, maka dengan penghapusan hambatan baik tarif maupun non tarif, maka lalu lintas antarnegara lebih leluasa. Perdagangan bebas akan mendorong setiap pelaku usaha untuk memproduksi komoditi yang paling menguntungkan dan memiliki daya saing. Dan pada gilirannya, pasar dalam negeri Indonesia dipenuhi oleh produk-produk dari negara-negara anggota ASEAN dan Cina sehingga menciptakan persaingan antara pelaku usaha. Persaingan antara barang sejenis menguntungkan bagi konsumen Indonesia untuk dapat memiliki banyak pilihan atas produk yang sejenis⁷⁴. Hal ini perlu digarisbawahi, pemerintah Indonesia haruslah menguatkan pondasi hukum di Indonesia agar dapat tercipta persaingan yang sehat yang tidak merugikan pelaku usaha dan konsumen.

d. Menciptakan kepastian hukum;

⁷³ Lihat . Yani Mulia Banjarsari *Keterkaitan Hukum Internasional Dalam Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Perdagangan Internasional* yang diterbitkan oleh Bulletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Edisi 53 Tahun 2008.

⁷⁴ Lihat Amir M.S,*op.cit*, hlm 203.

Dalam pembangunan ekonomi, hukum itu dapat berperan bila hukum mampu menciptakan “*stability, predictability, dan fairness*”. Adapun yang termasuk ke dalam *stability* yaitu potensi hukum menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing. Dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebahagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan tradisional adalah merupakan fungsi dari suatu hukum dan aspek keadilan (*fairness*), yaitu seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan birokrasi yang berlebihan⁷⁵.

3. Keuntungan dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN

a. Mempererat hubungan ekonomi antar anggota;

Perdagangan bebas akan mendorong rasa solidaritas antar bangsa yang terkait di kawasan itu. Rasa solidaritas ini akan mendorong kerjasama antar bangsa di kawasan itu baik dalam menghadapi lawan ekonomi, maupun dalam mencari kawan. Jika dikaitkan dengan perdagangan bebas ASEAN-China, maka perdagangan bebas ASEAN-China dapat mendorong solidaritas antara negara-negara anggota ASEAN dan Cina. Hal ini juga akan

⁷⁵ Ini dikutip dari Erman Rajagukguk, Peran Hukum di Indonesia : menjaga persatuan, memulihkan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial, yang disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI Depok 5 Februari 2000 diakses dari www.ermanhukum.com pada 22 Mei 2017 jam 05.00 WIB.

berimbang pada pada bidang yang sangat luas tidak hanya bidang ekonomi tetapi juga menyeret bidang politik, pertahanan, dan keamanan kawasan⁷⁶.

Dengan adanya perdagangan bebas, maka negara Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diproduksinya⁷⁷. Begitu juga sebaliknya, maka Cina dan negara-negara anggota ASEAN yang lain juga adanya keterikatan dengan negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Sehingga terjadilah ekspor dari Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN dan Cina.

Selain hal diatas, pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dapat menjadi sarana transfer teknologi modern. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern⁷⁸. Dapat menciptakan persaingan dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.

- b. Dapat menciptakan persaingan dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;

Perdagangan bebas memberikan kemungkinan untuk persaingan regional yang akan mendorong efisiensi dan produktivitas⁷⁹. Perdagangan bebas, memungkinkan setiap negara anggota melakukan produksi massa, sesuai keunggulan masing-masing, hingga mencapai titik atau skala

⁷⁶ Lihat Amir M.S., *op.cit*, hlm 203-205.

⁷⁷ Ini merupakan pendapat dari Sadono Sukirno yang dikutip dari tulisan Yani Mulia Banjarsari, *op.cit*.

⁷⁸ *Locit..*

⁷⁹ Lihat pendapat Amir M.S. yang dikutip dari buku Lihat Tulus T.H. Tambunan, hlm 229.

ekonomis, yang berarti penurunan biaya produksi. Dengan demikian, output yang dihasilkan dapat dipasar dengan biaya/ harga lebih murah dibandingkan hasil produksi dengan skala yang lebih kecil (tidak optimal) karena pasar kecil. Berarti juga, setiap negara bisa ,mendapatkan barang-barang dengan harga yang lebih murah daripada harga dari hasil produksi sendiri. Sehingga hal tersebut dapat membuat konsumen memiliki banyak pilihan terhadap suatu produk. Selain itu, tidak hanya volume pasar regional meningkat, tetapi perdagangan bebas juga memperbanyak aneka ragam komoditi yang diperdagangkan antarnegara anggota, baik produk-produk konsumen maupun produsen. Hal ini membuat masyarakat dan pengusaha di kawasan tersebut mempunyai pilihan yang banyak, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada volume maupun diversifikasi produksi dan peningkatan kesejahteraan di kawasan tersebut.

Dengan adanya kawasan perdagangan bebas bisa dibentuk suatu *marketing board* untuk produk-produk ekspor yang sama (misalnya Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk karet) untuk bertindak selaku penjual tunggal ke negara-negara di luar kawasan (misalnya ASEAN). Di samping itu, juga ada kemungkinan bisa dibentuknya suatu *central purchasing board* yang bertindak sebagai pembeli tunggal untuk barang-barang impor yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara anggota. Dengan cara ini dapat dihindari

persaingan yang tidak sehat, baik selaku negara penjual maupun negara pembeli⁸⁰.

c. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya;

Dengan terstimulasi oleh rendahnya tarif dan dihilangkannya beberapa penghalang dalam perdagangan bilateral antara ASEAN dan Cina, terdapat sebuah babak baru dalam strukturisasi ulang industri regional dan peluang baru bagi para pengusaha, baik Cina maupun ASEAN, untuk melakukan investasi terhadap pasar yang dinilai cukup potensial. Karena dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China tidak hanya dilakukan Perdagangan Barang tetapi juga ditandatangani perjanjian investasi. Disamping itu, kemungkinan kerjasama bukan hanya dibidang ekonomi seperti produksi dan investasi tetapi bisa juga meliputi teknologi dan ilmu pengetahuan, inovasi budaya, dan sosial.⁸¹

4. Kerugian dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai Negara

a. Eksploitasi Cina terhadap Indonesia, karena memanfaatkan pasar Indonesia untuk mendistribusikan barang produksi Cina.

Banyaknya produk-produk Cina yang masuk ke pasar Indonesia sehingga membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing, apalagi

⁸⁰ Pendapat Amir M.S. yang dikutip dari buku Lihat Tulus T.H. Tambunan, *op.cit*, hlm 229.

⁸¹ Tulus T.H. Tambunan, *ibid*, hlm 229.

terhadap produk yang sejenis. Dimana produk-produk Cina yang memasuki pasar Indonesia mempunyai kualitas dan harga tidak jauh berbeda dengan produk-produk lokal. Hal tersebut bisa disebabkan karena produktivitas tenaga kerja di Cina yang tinggi dan efisien serta ditunjang dengan upah yang rendah.

Peningkatan masuknya produk-produk Cina ke Indonesia, maka tidak mustahil pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari Cina ditunjang pula dengan rendahnya daya saing dari produk-produk serupa yang merupakan buatan dalam negeri⁸². Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China lebih banyak *cost*nya daripada manfaatnya bagi Indonesia.⁸³

b. Dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China berdampak buruk pada perekonomian Indonesia;

Pemberlakuan perjanjian perdagangan ASEAN-China berdampak pada ketidakseimbangan neraca perdagangan antara Indonesia-China.⁸⁴

⁸² Tulus T.H. Tambunan, *op.cit*, hlm 26.

⁸³ Ini merupakan pendapat dari Tony Prasetyantono seorang ekonom BNI yang dimuat dalam tulisan yang berjudul *Menggugat Perjanjian ASEAN-China* yang diakses dari situs http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid= , pada 24 Mei 2017 jam 11.44 WIB.

⁸⁴ Pendapat Latif Adam dari pusat penelitian ekonomi LIPI dalam tulisannya *ACFTA dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China* yang diakses dari <http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagangindonesia-china/>, pada 21 Mei 2017 jam 4.00 WIB.

Permasalahan yang akan muncul dari tidak seimbangnya perdagangan Indonesia-China yaitu⁸⁵:

- 1) Pada perdagangan Indonesia-China akan menimbulkan *term of trade* yang tidak seimbang yang disebabkan oleh produk primer produksi Indonesia memiliki harga yang relatif rendah dibandingkan dengan produk industri pengolahan dari Cina.
- 2) Indonesia yang mengandalkan produk-produk primer sebagai komoditas ekspor dengan harga yang murah menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proses nilai tambah.

Akan tetapi untuk tetap mengandalkan produk primer dapat menjadi bumerang bagi perkembangan industri nasional. Hal ini disebabkan karena produsen barang primer lebih suka memasarkan produknya ke Cina sehingga membuat industri nasional sering tidak kebagian faktor input (seperti CPO, gas, dan batubara) untuk menjalankan proses produksi, disamping itu, barang primer yang diekspor ke Cina digunakan untuk menghasilkan beragam produk industri yang nantinya dipasarkan ke Indonesia lagi. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China tidak hanya mencakup pada Perdagangan Barang.

⁸⁵ Dari tulisan Latif Adam, *ibid.*

5) Kerugian dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN

- a. Pasar negara-negara anggota ASEAN dijadikan tempat untuk mendistribusikan produk-produk dari Cina;

Produk-produk asal Cina telah mendominasi pasar negara-negara anggota ASEAN. Sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan perdagangan bebas ASEAN-China akan semakin meningkatkan dominasi barang asal Cina di seluruh kawasan ASEAN yang sekarang menjadi pangsa pasar ketiga terbesar bagi Cina.⁸⁶

Dengan diadakannya pasar Negara-negara anggota ASEAN untuk mendistribusikan produk-produk Cina juga berakibat bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN. Karena hal tersebut juga berakibat berkurangnya pangsa pasar Indonesia di pasar Negara-negara anggota ASEAN lainnya.

- b. Dapat menimbulkan persaingan antara para Pihak sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.

Dengan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China maka dengan bebas produk-produk suatu negara masuk ke negara lain sesama pihak perjanjian. Dalam hal ini, produk-produk Cina dan negara-negara anggota ASEAN bebas masuk ke negara-negara para pihak tanpa hambatan baik tarif maupun non-tarif. Akan tetapi, hal tersebut dapat

⁸⁶ Lihat pada tulisan Menggugat Perjanjian Kerjasama ASEAN-China dalam situs http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1, yang diakses pada tanggal 27 November 2010 jam 11.44 WIB.

berakibat menimbulkan persaingan antara para Pihak sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Persaingan diantara para pihak disebabkan produk-produk dari Cina dan negara-negara kebanyakan sejenis. Jadi jika produk-produk Cina dan negara-negara anggota ASEAN diekspor ke negara maju bukannya saling melengkapi tapi saling bersaing. Sehingga terkadang hal ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara para pelaku usaha. Jadi, dengan adanya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat atau kompetitif sesama negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dan Cina karena barang yang akan diperjualbelikan itu sejenis.

6) Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Kerjasama ACFTA

Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Agreement* banyak membawa pengaruh bagi perekonomian Indonesia walaupun sebagian besar menganggap perjanjian ini akan membawa pengaruh buruk, namun Indonesia masih bisa mengambil sedikit keuntungan dari adanya perjanjian ini. Indonesia pastinya harus selalu siap dengan kondisi apapun menghadapi ACFTA mengingat perjanjian ini terlanjur telah disepakati bersama dengan negara-negara yang terlibat didalamnya. Salah satu yang bisa dilakukan dengan meningkatkan produktifitas produk-produk yang di unggulkan, Indonesia harus jeli melihat produk apa saja yang memiliki nilai jual yang tinggi bagi pasar Cina.

Meningkatkan daya saing, memperbaiki infrastruktur yang mendukung jalannya perdagangan, serta mengambil kebijakan yang tegas ketiga hal ini apabila diterapkan dengan baik oleh pemerintah pasti akan meningkatkan ekspor barang-barang industri migas ataupun non migas khususnya alas kaki dan tekstil sehingga peluang Indonesia untuk mendapatkan keuntungan di ACFTA ini akan semakin besar. Mengingat aktivitas ekspor yang dilakukan oleh negara akan menopang perekonomian Indonesia sehingga tercipta lapangan kerja dan pengangguran akan sedikit berkurang dan tercipta kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang perdagangan luar negeri adalah bagaimana meningkatkan daya saing terhadap ekonomi negara-negara kawasan yang makin meningkat pertumbuhan dan produktifitasnya. Di antara negara-negara di Asia Timur itu, ekonomi Cina memang sangat besar, dan besar pula pertumbuhan serta daya saingnya. Oleh Karena itu besarnya ini, Cina memang menjadi masalah tidak hanya bagi Indonesia, akan tetapi juga bagi seluruh kawasan dan malahan bagi seluruh dunia. Berikut beberapa hambatan Indonesia dalam bersaing dengan industri negara lain⁸⁷:

⁸⁷ Andri Gilang Nugraha, (staf dibagian Keuangan Sekretariat Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementrian Perdagangan. Tantangan dan Peluang serta Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi penuh ACFTA. Buletin KPI edisi - 02/KPI/2010..hlm. 4

- a. Industri Indonesia sangat tergantung pada impor sumber-sumber teknologi dari negara lain, terutama negara-negara yang telah maju dalam berteknologi dan berindustri (*industrially developed Countries*). Ketergantungan yang tinggi terhadap impor teknologi ini merupakan salah satu faktor tersembunyi yang menjadi penyebab kegagalan dari berbagai sistem industri dan sistem ekonomi di Indonesia.
- b. Tataran nasional maupun internasional, sistem industri Indonesia tidak memiliki kemampuan responsif dan adaptif yang mandiri. Karenanya sangat lemah dalam mengantisipasi perubahan dan tak mampu melakukan tindakan-tindakan preventif untuk menghadapi terjadinya perubahan tersebut. Tuntutan perubahan pasar dan persaingan antar industri secara global tidak hanya mencakup perubahan didalam corak, sifat, kualitas, dan harga diri komoditas yang diperdagangkan, tetapi juga tuntutan lain yang muncul karena berkembangnya idealisme masyarakat dunia terhadap hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, liberalisasi perdagangan, dan sebagainya
- c. Gerak ekonomi Indonesia sangat tergantung pada arus modal asing yang masuk ke Indonesia serta besarnya cadangan devisa yang terhimpun melalui perdagangan dan hutang luar negeri
- d. Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena adanya keunggulan komparatif yang berkaitan dengan (i) tersedianya sumber

daya alam seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu; dan (ii) tersedianya tenaga kerja yang murah seperti pada industri tekstil, alas kaki, dan barang elektronik. Keunggulan komparatif, bukan keunggulan kompetitif, inilah yang dijadikan acuan untuk menarik investor

- e. Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam bentuk bahan mentah (*raw material*), sehingga nilai tambahan yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam bentuk mebel (*furniture*) karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi finishing
- f. Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari pola penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang masih mementingkan jumlah tenaga manusia yang terserap (*labor intensive*) ketimbang kualitas tenaga manusianya (*labor efficiency*).

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka diambil suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Pelaksanaan perdagangan bebas *ASEAN-China Free Trade Agreement* di Indonesia secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement on*

Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi serta membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ACFTA. Pengaturan perdagangan bebas yang diatur didalam ACFTA merupakan saran untuk mempermudah hubungan antar negara dalam melakukan perdagangan internasional serta meningkatkan daya saing antar pelaku usaha yang berada didalam kawasan perdagangan bebas dengan pembatasan hambatan-hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif.

2. ACFTA merupakan ajang persaingan global dalam bidang produksi barang maupun jasa yang diadakan sesuai dengan perjanjian Indonesia dengan Cina pada awal Januari 2010. Kalaupun strategi persaingan bangsa Indonesia terhadap Cina mengakibatkan kerugian akibat ACFTA bagi Indonesia. ACFTA menimbulkan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun dampak negatif dari adanya ACFTA mendominasi keterpurukan terhadap perekonomian Indonesia. Kerugian akibat ACFTA bagi Indonesia dimana eksploitasi Cina terhadap Indonesia dalam mendistribusikan barang-barang produksi Cina di pasar Indonesia. Kemampuan produk-produk hasil Cina ke pasar Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan produk hasil Indonesia ke Pasar Cina.

Saran

Adapun saran dari penulis ;

1. Sikap pesimisme para produsen Indonesia dijadikan estimasi Indonesia kalah bersaing dengan Cina. ACFTA dianggap terlalu agresif untuk melakukan liberalisasi ekonomi Indonesia. Banyak faktor yang menentukan tinggi rendahnya daya saing, salah satunya adalah peran dari strategi perdagangan dan industri. Tanpa strategi industri dan perdagangan suatu negara tidak mungkin membangun industri yang kompetitif dan produktif. Dalam hal ini peran masyarakat sangatlah penting dalam memberikan aspirasi kepada para wakil rakyat agar peraturan ataupun kebijakan yang nantinya dikeluarkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan ACFTA seharusnya terlebih dahulu dengan memperhatikan kondisi dari negara tersebut apakah sesuai atau tidak. Dan sebelum menerapkan suatu aturan atau kebijakan baru sebaiknya pemerintah Indonesia perlu melakukan sosialisasi kepada publik agar masyarakat bisa mempersiapkan diri terhadap aturan atau kebijakan baru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boer Mauna. 2013. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. P.T. Alumni: Bandung.

Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung.

- Eddy Pratomo. 2011. *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*. P.T. Alumni: Bandung
- Huala Adolf. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional*. CV Keni Media: Bandung..
- Huala Adolf. 2013. *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Juajir Sumardi. 2012. *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Arus Timur: Makassar.
- Johanes Gunawan. 2003. *Aspek Politik Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad Ashri. 2012. *Hukum Perjanjian Internasional*. Arus Timur: Makassar.
- Muhammad Sood. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. P.T. Alumni: Bandung.
- N. Rosyidah Rakhmawati. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*. Bayumedi Publishing: Malang.
- Putu Gelgel. 2009. *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasi*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Syahmin, AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analitis*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tulus T.H. Tambunan. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Jurnal atau Bulletin

-----Sosialisasi Direktorat Jenderal HKI Tentang Pentingnya Merek dan Indikasi Geografis di Sejumlah Daerah; *Bisnis Indonesia*; 21 Januari 2008.

Andri Gilang Nugraha. "Tantangan dan Peluang serta Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ACFTA.", *Buletin KPI* Edisi 2, 2010. Hlm 4.

Lidya Christin Sinaga. "Indonesia di Tengah Kesepakatan ACFTA.", 2000. *Implementasi Jurnal Penelitian Politik Volume 7 No. 2*.

Murad Purba, "Peranan Ketentuan Asal Barang Dalam Perdagangan Barang Bebas.", *Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia*. 2008. Edisi V

Yani Mulia Banjarsari. "Keterkaitan Hukum Internasional Dalam Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Perdagangan Internasional." *Bulletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan* Edisi 53, 2008.

Skripsi

Gracia Regina Redu. 2013. *Tindak Lanjut Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Oleh Indonesia Dalam Menghadapi Kerjasama ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

Idar Desriyanti. 2013. *Pengaruh ASEAN-China Free Trade Agreement Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Internet

<http://studyandlearningnow.blogspot.co.id/2013/01/sejarah-perdagangan-di-indonesia.html>

http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task-view&id=385&Itemid=

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375&Itemid=29 diakses pada tanggal 16 Desember 2016

situs Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20%20China%20FTA>

<http://www.aseansec.org/19105.htm>

<http://www.aseansec.org/5874.htm>

<http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan dagangindonesia- china>

https://www.academia.edu/5135355/Etnis_cina_dlm_perdagangan_di_indonesia

<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2004/048-04.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ratifikasi>

LAMPIRAN



DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Jalan. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528600
Fax. 021-23528610

SURAT KETERANGAN NOMOR: 15 /PPI.3/SK-TU/05/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Astuti, S.E., M.Si.
NIP : 196208151987032005
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit/Instansi : Direktorat Perundingan ASEAN
Ditjen. Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Telepon/Fax : 021 - 3858202

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : A Trimayasari Tahir
NIM : B11113341
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Universitas Hasaniddin

Telah melaksanakan Penelitian pada Direktorat Perundingan ASEAN Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan pada tanggal 21 Maret 2017

Demikian, Surat Keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Mei 2017

Direktorat Perundingan ASEAN
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Dwi Astuti, S.E., M.Si.
NIP. 196208151987032005

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC
CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN
NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI
MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 Nopember 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara Anggota-anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat China;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN FRAMEWORK
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION
BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIANNATIONS AND THE**

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-
NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
REPUBLIK RAKYAT CHINA).

Pasal 1

Mengesahkan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 4 Nopember 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat China yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum,

Baharuddin Mamasta

**FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE
ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

PREAMBLE

WE, the Heads of Government/State of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Laos PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam, Member States of the Association of South East Asian Nations (collectively, "ASEAN" or "ASEAN Member States", or individually, "ASEAN Member State"), and the People's Republic of China ("China") :

RECALLING our decision made at the ASEAN-China Summit held on 6 November 2001 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, regarding a Framework on Economic Co-operation and to establish an ASEAN-China Free Trade Area ("ASEAN-China FTA") within ten years with special and differential treatment and flexibility for the newer ASEAN Member States of Cambodia, Laos PDR, Myanmar and Vietnam ("the newer ASEAN Member States") and with provision for an early harvest in which the list of products and services will be determined by mutual consultation;

DESIRING to adopt a Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation ("this Agreement") between ASEAN and China (collectively, "the Parties", or individually referring to an ASEAN Member State or to China as a "Party") that is forward looking in order to forge closer economic relations in the 21st century;

DESIRING to minimise barriers and deepen economic linkages between the Parties; lower costs; increase intra-regional trade and investment; increase economic efficiency; create a larger market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of the Parties; and enhance the attractiveness of the Parties to capital and talent;

BEING confident that the establishment of an ASEAN-China FTA will create a partnership between the Parties, and provide an important mechanism for strengthening co-operation and supporting economic stability in East Asia;

RECOGNISING the important role and contribution of the business sector in enhancing trade and investment between the Parties and the need to further promote and facilitate their co-operation and utilisation of greater business opportunities provided by the ASEAN-China FTA;

RECOGNISING the different stages of economic development among ASEAN Member States and the need for flexibility, in particular the need to facilitate the increasing participation of the newer ASEAN Member States in the ASEAN-China economic co-operation and the expansion of their exports, including, inter alia, through the strengthening of their domestic capacity, efficiency and competitiveness;

REAFFIRMING the rights, obligations and undertakings of the respective parties under the World Trade Organisation (WTO), and other multilateral, regional and bilateral agreements and arrangements;

RECOGNISING the catalytic role that regional trade arrangements can contribute towards accelerating regional and global liberalisation and as building blocks in the framework of the multilateral trading system;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Objectives

The objectives of this Agreement are to:

- (a) strengthen and enhance economic, trade and investment co-operation between the Parties;
- (b) progressively liberalise and promote trade in goods and service as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime;
- (c) explore new areas and develop appropriate measures for closer economic co-operation between the Parties and
- (d) facilitate the more effective economic integration of the newer ASEAN Member States and bridge the development gap among the Parties.

ARTICLE 2

Measures For Comprehensive Economic Co-operation

The Parties agree to negotiate expeditiously in order to establish an ASEAN-China FTA within 10 years, and to strengthen and enhance economic co-operation through the following:

- (a) progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods;
- (b) progressive liberalisation of trade in services with substantial sectoral coverage;
- (c) establishment of an open and competitive investment regime that facilitates and promotes investment within the ASEAN-China FTA;
- (d) provision of special and differential treatment and flexibility to the newer ASEAN Member States;
- (e) provision of flexibility to the Parties in the ASEAN- China FTA negotiations to address their sensitive areas in the goods, services and investment sectors with such flexibility to be negotiated and mutually agreed based on the principle of reciprocity and mutual benefits;
- (f) establishment of effective trade and investment facilitation measures, including, but not limited to, simplification of customs procedures and development of mutual recognition arrangements;
- (g) expansion of economic co-operation in areas as may be mutually agreed between the Parties that will complement the deepening of trade and investment links between the Parties and formulation of action plans and programmes in order to implement the agreed sectors/areas of co-operation; and
- (h) establishment of appropriate mechanism for the purposes of effective implementation of this Agreement.

PART 1

ARTICLE 3

Trade In Goods

1. In addition to the Early Harvest Programme under Article 6 of this Agreement, and with a view to expediting the expansion of trade in goods, the Parties agree to enter into negotiations in which duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Article XXIV (8)(b) of the WTO General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) shall be eliminated on substantially all trade in goods between the Parties.
2. For the purposes of this Article, the following definitions shall apply unless the context otherwise requires:
 - (a) "ASEAN 6" refers to Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand;

- (b) "applied MFN tariff rates" shall include in-quota rates, and shall:
 - (i) in the case of ASEAN Member States (which are WTO members as of 1 July 2003) and China, refer to their respective applied rates as of 1 July 2003; and
 - (ii) in the case of ASEAN Member States (which are non-WTO members as of 1 July 2003), refer to the rates as applied to China as of 1 July 2003;
 - (c) "non-tariff measures" shall include non-tariff barriers.
- 3. The tariff reduction or elimination programme of the Parties shall require tariffs on listed products to be gradually reduced and where applicable, eliminated, in accordance with this Article.
- 4. The products which are subject to the tariff reduction or elimination programme under this Article shall include all products not covered by the Early Harvest Programme under Article 6 of this Agreement, and such products shall be categorised into 2 Tracks as follows:
 - (a) Normal Track : Products listed in the Normal Track by a Party on its own accord shall:
 - (i) have their respective applied MFN tariff rates gradually reduced or eliminated in accordance with specified schedules and rates (to be mutually agreed by the Parties) over a period from 1 January 2005 to 2010 for ASEAN 6 and China, and in the case of the newer ASEAN Member States, the period shall be from 1 January 2005 to 2015 with higher starting tariff rates and different staging; and
 - (ii) in respect of those tariffs which have been reduced but have not been eliminated under paragraph 4(a)(i) above, they shall be progressively eliminated within timeframes to be mutually agreed between the Parties.
 - (b) Sensitive Track : Products listed in the Sensitive Track by a Party on its own accord shall:
 - (i) have their respective applied MFN tariff rates reduced in accordance with the mutually agreed end rates and end dates; and
 - (ii) where applicable, have their respective applied MFN tariff rates progressively eliminated within timeframes to be mutually agreed between the Parties.

5. The number of products listed in the Sensitive Track shall be subject to a maximum ceiling to be mutually agreed among the Parties.
6. The commitments undertaken by the Parties under this Article and Article 6 of this Agreement shall fulfil the WTO requirements to eliminate tariffs on substantially all the trade between the Parties.
7. The specified tariff rates to be mutually agreed between the Parties pursuant to this Article shall set out only the limits of the applicable tariffs rates or range for the specified year of implementation by the Parties and shall not prevent any Party from accelerating its tariff reduction or elimination if it so wishes to.
8. The negotiations between the Parties to establish the ASEAN-China FTA covering trade in goods shall also include, but not be limited to the following:
 - (a) other detailed rules governing the tariff reduction or elimination programme for the Normal Track and the Sensitive Track as well as any other related matters, including principles governing reciprocal commitments, not provided for in the preceding paragraphs of this Article;
 - (b) Rules of Origin;
 - (c) treatment of out-of-quota rates;
 - (d) modification of a Party's commitment under the agreement on trade in goods based on Article XXVIII of the GATT;
 - (e) non-tariff measures imposed on any products covered under this Article or Article 6 of this Agreement, including, but not limited to quantitative restrictions or prohibition on the importation of any product or on the export or sale for export of any product, as well as scientifically unjustifiable sanitary and phytosanitary measures and technical barriers to trade;
 - (f) safeguards based on the GATT principles, including, but not limited to the following elements: transparency, coverage, objective criteria for action, including the concept of serious injury or threat thereof, and temporary nature;
 - (g) disciplines on subsidies and countervailing measures and anti-dumping measures based on the existing GATT disciplines; and
 - (h) facilitation and promotion of effective and adequate protection of trade-related aspects of intellectual property rights based on existing WTO, World Intellectual Property Organization (WIPO) and other relevant disciplines.

ARTICLE 4

Trade In Services

With a view to expediting the expansion of trade in services, the Parties agree to enter into negotiations to progressively liberalise trade in services with substantial sectoral coverage. Such negotiations shall be directed to:

- (a) progressive elimination of substantially all discrimination between or among the Parties and/or prohibition of new or more discriminatory measures with respect to trade in services between the Parties, except for measures permitted under Article V(1)(b) of the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS);
- (b) expansion in the depth and scope of liberalisation of trade in services beyond those undertaken by ASEAN Member States and China under the GATS; and
- (c) enhanced co-operation in services between the Parties in order to improve efficiency and competitiveness, as well as to diversify the supply and distribution of services of the respective service suppliers of the Parties.

ARTICLE 5

Investment

To promote investments and to create a liberal, facilitative, transparent and competitive investment regime, the Parties agree to:

- (a) enter into negotiations in order to progressively liberalise the investment regime;
- (b) strengthen co-operation in investment, facilitate investment and improve transparency of investment rules and regulations; and
- (c) provide for the protection of investments.

ARTICLE 6

Early Harvest

1. With a view to accelerating the implementation of this Agreement, the Parties agree to implement an Early Harvest Programme (which is an integral part of the ASEAN-China FTA) for products covered under paragraphs 3(a) below and which will commence and end in accordance with the timeframes set out in this Article.
2. For the purposes of this Article, the following definitions shall apply unless the context otherwise requires:
 - (a) "ASEAN 6" refers to Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand;

- (b) "applied MFN tariff rates" shall include in-quota rates, and shall:
- (i) in the case of ASEAN Member States (which are WTO members as of 1 July 2003) and China, refer to their respective applied rates as of 1 July 2003; and
 - (ii) in the case of ASEAN Member States (which are non-WTO members as of 1 July 2003), refer to the tariff rates as applied to China as of 1 July 2003.
3. The product coverage, tariff reduction and elimination, implementation timeframes, rules of origin, trade remedies and emergency measures applicable to the Early Harvest Programme shall be as follows:

(a) Product Coverage

- (i) All products in the following chapters at the 8/9 digit level (HS Code) shall be covered by the Early Harvest Programme, unless otherwise excluded by a Party in its Exclusion List as set out in Annex 1 of this Agreement, in which case these products shall be exempted for that Party:

Chapter	Description
01	Live Animals
02	Meat and Edible Meat Offal
03	Fish
04	Dairy Produce
05	Other Animals Products
06	Live Trees
07	Edible Vegetables
08	Edible Fruits and Nuts

- (ii) A Party which has placed products in the Exclusion List may, at any time, amend the Exclusion List to place one or more of these products under the Early Harvest Programme.

- (iii) The specific products set out in Annex 2 of this Agreement shall be covered by the Early Harvest Programme and the tariff concessions shall apply only to the parties indicated in Annex 2. These parties must have extended the tariff concessions on these products to each other.
- (iv) For those parties which are unable to complete the appropriate product lists in Annex 1 or Annex 2, the lists may still be drawn up no later than 1 March 2003 by mutual agreement.

(b) Tariff Reduction and Elimination

- (i) All products covered under the Early Harvest Programme shall be divided into 3 product categories for tariff reduction and elimination as defined and to be implemented in accordance with the timeframes set out in Annex 3 to this Agreement. This paragraph shall not prevent any Party from accelerating its tariff reduction or elimination if it so wishes.
- (ii) All products where the applied MFN tariff rates are at 0%, shall remain at 0%.
- (iii) Where the implemented tariff rates are reduced to 0%, they shall remain at 0%.
- (iv) A Party shall enjoy the tariff concessions of all the other parties for a product covered under paragraph 3(a)(i) above so long as the same product of that Party remains in the Early Harvest Programme under paragraph 3(a)(i) above.

(c) Interim Rules of Origin

The Interim Rules of Origin applicable to the products covered under the Early Harvest Programme shall be negotiated and completed by July 2003. The Interim Rules of Origin shall be superseded and replaced by the Rules of Origin to be negotiated and implemented by the Parties under Article 3(8)(b) of this Agreement.

(d) Application of WTO provisions

The WTO provisions governing modification of commitments, safeguard actions, emergency measures and other trade remedies, including anti-dumping and subsidies and countervailing measures, shall, in the interim, be applicable to the products covered under the Early Harvest Programme and shall be superseded and replaced by the relevant disciplines negotiated and agreed to by the Parties under Article 3(8) of this Agreement once these disciplines are implemented.

4. In addition to the Early Harvest Programme for trade in goods as provided for in the preceding paragraphs of this Article, the Parties will explore the feasibility of an early harvest programme for trade in services in early 2003.
5. With a view to promoting economic co-operation between the Parties, the activities set out in Annex 4 of this Agreement shall be undertaken or implemented on an accelerated basis, as the case may be.

PART 2

ARTICLE 7

Other Areas of Economic Co-operation

1. The Parties agree to strengthen their co-operation in 5 priority sectors as follows:
 - (a) agriculture;
 - (b) information and communications technology;
 - (c) human resources development;
 - (d) investment; and
 - (e) Mekong River basin development.
2. Co-operation shall be extended to other areas, including, but not limited to, banking, finance, tourism, industrial co-operation, transport, telecommunications, intellectual property rights, small and medium enterprises (SMEs), environment, bio-technology, fishery, forestry and forestry products, mining, energy and sub-regional development.
3. Measures to strengthen co-operation shall include, but shall not be limited to:
 - (a) promotion and facilitation of trade in goods and services, and investment, such as:
 - (i) standards and conformity assessment;
 - (ii) technical barriers to trade/non-tariff measures; and
 - (iii) customs co-operation.
 - (b) increasing the competitiveness of SMEs;
 - (c) promotion of electronic commerce;
 - (d) capacity building; and
 - (e) technology transfer.
4. The Parties agree to implement capacity building programmes and technical assistance, particularly for the newer ASEAN Member States, in order to adjust their economic structure and expand their trade and investment with China.

PART 3

ARTICLE 8 Timeframes

1. For trade in goods, the negotiations on the agreement for tariff reduction or elimination and other matters as set out in Article 3 of this Agreement shall commence in early 2003 and be concluded by 30 June 2004 in order to establish the ASEAN-China FTA covering trade in goods by 2010 for Brunei, China, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, and by 2015 for the newer ASEAN Member States.
2. The negotiations on the Rules of Origin for trade in goods under Article 3 of this Agreement shall be completed no later than December 2003.
3. For trade in services and investments, the negotiations on the respective agreements shall commence in 2003 and be concluded as expeditiously as possible for implementation in accordance with the timeframes to be mutually agreed: (a) taking into account the sensitive sectors of the Parties; and (b) with special and differential treatment and flexibility for the newer ASEAN Member States.
4. For other areas of economic co-operation under Part 2 of this Agreement, the Parties shall continue to build upon existing or agreed programmes set out in Article 7 of this Agreement, develop new economic co-operation programmes and conclude agreements on the various areas of economic co-operations. The Parties shall do so expeditiously for early implementation in a manner and at a pace acceptable to all the parties concerned. The agreements shall include timeframes for the implementation of the commitments therein.

ARTICLE 9 Most-Favoured Nation Treatment

China shall accord Most-Favoured Nation (MFN) Treatment consistent with WTO rules and disciplines to all the non-WTO ASEAN Member States upon the date of signature of this Agreement.

ARTICLE 10
General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between or among the Parties where the same conditions prevail, or a disguised restriction on trade within the ASEAN-China FTA, nothing in this Agreement shall prevent any Party from taking and adopting measures for the protection of its national security or the protection of articles of artistic, historic and archaeological value, or such other measures which it deems necessary for the protection of public morals, or for the protection of human, animal or plant life and health.

ARTICLE 11
Dispute Settlement Mechanism

1. The Parties shall, within 1 year after the date of entry into force of this Agreement, establish appropriate formal dispute settlement procedures and mechanism for the purposes of this Agreement.
2. Pending the establishment of the formal dispute settlement procedures and mechanism under paragraph 1 above, any disputes concerning the interpretation, implementation or application of this Agreement shall be settled amicably by consultations and/or mediation.

ARTICLE 12
Institutional Arrangements For The Negotiations

1. The ASEAN-China Trade Negotiation Committee (ASEAN-China TNC) that has been established shall continue to carry out the programme of negotiations set out in this Agreement.
2. The Parties may establish other bodies as may be necessary to co-ordinate and implement any economic co-operation activities undertaken pursuant to this Agreement.
3. The ASEAN-China TNC and any aforesaid bodies shall report regularly to the ASEAN Economic Ministers (AEM) and the Minister of the Ministry of Foreign

Trade and Economic Co-operation (MOFTEC) of China, through the meetings of the ASEAN Senior Economic Officials (SEOM) and MOFTEC, on the progress and outcome of its negotiations.

4. The ASEAN Secretariat and MOFTEC shall jointly provide the necessary secretariat support to the ASEAN-China TNC whenever and wherever negotiations are held.

ARTICLE 13 Miscellaneous Provisions

1. This Agreement shall include the Annexes and the contents therein, and all future legal instruments agreed pursuant to this Agreement.
2. Except as otherwise provided in this Agreement, this Agreement or any action taken under it shall not affect or nullify the rights and obligations of a Party under existing agreements to which it is a party.
3. The Parties shall endeavour to refrain from increasing restrictions or limitations that would affect the application of this Agreement.

ARTICLE 14 Amendments

The provisions of this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties.

ARTICLE 15 Depositary

For the ASEAN Member States, this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof, to each ASEAN Member State.

ARTICLE 16

Entry Into Force

1. This Agreement shall enter into force on 1 July 2003.
2. The Parties undertake to complete their internal procedures for the entry into force of this Agreement prior to 1 July 2003.
3. Where a Party is unable to complete its internal procedures for the entry into force of this Agreement by 1 July 2003, the rights and obligations of that Party under this Agreement shall commence on the date of the completion of such internal procedures.
4. A Party shall upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Agreement notify all the other parties in writing.

IN WITNESS WHEREOF, WE have signed this Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China.

DONE at Phnom Penh, this 4th day of November, 2002 in duplicate copies in the English Language.

For Brunei Darussalam
China

For the People's Republic of

HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

ZHU RONGJI
Premier

For the Kingdom of Cambodia

HUN SEN
Prime Minister

For the Republic of Indonesia

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
President

For the Lao People's Democratic Republic

BOUNNHANG VORACHITH
Prime Minister

For Malaysia

MAHATHIR BIN MOHAMAD
Prime Minister

For the Union of Myanmar

SENIOR GENERAL THAN SHWE
Chairman of the State Peace and Development
Council And Prime Minister

For the Republic of the Philippines

GLORIA MACAPAGAL-ARROYO
President

For the Republic of Singapore

GOH CHOK TONG
Prime Minister

For the Kingdom of Thailand

L. LT.COL. THAKSIN SHINAWATRA
Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam

PHAN VAN KHAI
Prime Minister

Annex 1

Exclusion List Of A Party For Products Excluded From The Early Harvest Programme Under Article 6(3)(a)(i)

A. The following parties have completed their negotiations with respect to one another, and their Exclusion Lists are as follows:

1. ASEAN

(a) Brunei: No exclusion of any product

(b) Cambodia:

S/No	HS Code/Product Description (Cambodia)	HS Code/Product Description (China)
1.	0103.92.00 --Weighing 50 kg or more	China shall. As soon as is practically possible after the date of signature of this Agreement, provide the HS codes and product descriptions that will correspond to the HS codes and product descriptions of the product set out in the 2 nd column of this table

2.	0207.11.00 --Not cut in pieces, fresh or chilled	ditto
3.	0207.12.00 --Not cut in pieces, frozen	ditto
4.	0207.13.00 --Cuts and offal. Fresh or chilled	ditto
5.	0207.14.10 ---Wings	ditto
6.	0207.14.20 ---Thighs	ditto
7.	0207.14.30 ---Livers	ditto
8.	0207.14.90 ---Other	ditto
9.	0301.93.00 --Carp	ditto
10.	0702.00.00 Tomatoes, fresh or chilled	ditto
11.	0703.10.10 --Onions	ditto
12.	0703.20.00 -Garlic	ditto

13.	0704.10.10 --Cauliflowers	ditto
14.	0704.10.20 --Headed broccoli	ditto
15.	0704.90.10 --Cabbages	ditto
16.	0704.90.90 --Other	ditto
17.	0705.11.00 --Cabbage lettuce (head lettuce)	ditto
18.	0706.19.00 --Other	ditto
19.	0706.10.10 --Carrots	ditto
20.	0706.10.20 --Turnips	ditto
21.	0706.90.00 -Other	ditto
22.	0708.20.00 -Beans (vigna spp., Phaseolus spp.)	ditto
23.	0709.90.00 -Other	ditto

24.	0801.19.00 --Other	ditto
25.	0804.30.00 -Pineapples	ditto
26.	0804.50.00 -Guavas, mangoes and mangosteens	ditto
27.	0805.10.00 -Oranges	ditto
28.	0807.11.00 --Watermelons	ditto
29.	0807.19.00 --Other	ditto
30.	0810.90.20 --Longans	ditto

(c) Indonesia: No exclusion of any product¹

(d) Myanmar: No exclusion of any product

(e) Singapore: No exclusion of any product

(f) Thailand: No exclusion of any product

¹ Sweet Corn (HS 071010000) from Indonesia is subject to the multilateral negotiations in the WTO

(g) Vietnam: No exclusion of any product

S/No	HS Code/Product Description	HS Code/Product Description
------	-----------------------------	-----------------------------

	(Vietnam)	(China)
	0105 Live poultry, that is to say, fowls or the species Gallus Domesticus, ducks, Geese, Turkeys and guinea fowls	0105 Live poultry, that is to stay. Fowls or the species Gallus Domesticus, ducks, Geese, turkeys and guinea fowls
1.	010511900 -Weighing not more than 185g: --Fowls of the species Gallus Domesticus: ---Other	01051190 -Weighing not more than 185g: --Fowls of the species Gallus Domesticus: ---Other
2.	010592900 -Other --Fowls of the species Gallus Domesticus, weighing not more than 2,000g: ---Other	01059290 -Other --Fowls of the species Gallus Domesticus, weighing not more than 2,000g: ---Other
3.	010593000 -Other	01059310 -Other

	--Fowls of the species Gallus Domesticus weighing more than 2,000g:	--Fowls of the species Gallus Domesticus weighing more than 2,000g: --Pure-bred breeding 01059390 -Other: --Fowls of the species Gallus Domesticus weighing more than 2,000g: ---Other
4.	010599900 -Other: --Other: ---Other:	01059991 -Other: --Other: ---Other ----Ducks 01059992 -Other: --Other:

		---Other: ---Geese 01059993 -Other: --Other: ---Other: ----Guinea fowls 01059994 -Other: --Other: ---Other: ----Turkeys
	0207 Meat and edible offal, of the poultry of heading No. 01.03, fresh, chilled or frozen	0207 Meat and edible offal, of the poultry of heading No. 01.05, fresh, chilled or frozen
5.	020711000 -Of fowls of the species Gallus	02071100

	<p>Domesticus:</p> <p>--Not cut in pieces, fresh or chilled</p>	<p>-Of fowls of the species Gallus Domesticus:</p> <p>--Not cut in pieces, fresh or chilled</p>
6.	<p>02071000</p> <p>-Pf fowls of the species Gallus Domesticus:</p> <p>--Not cut in pieces frozen</p>	<p>02071200</p> <p>-Of fowls of the species Gallus domesticus:</p> <p>--Not cut in pieces, frozen</p>
7.	<p>020712000</p> <p>-Of fowls of the species Gallus Domesticus:</p> <p>--Cuts and offal, fresh or chilled</p>	<p>02071311</p> <p>-Of fowls of the species Gallus domesticus:</p> <p>--Cuts and offal, fresh or chilled:</p> <p>---Cuts:</p> <p>----With bone:</p> <p>02071319</p> <p>-Of fowls of the species Gallus domesticus:</p> <p>--Cuts and offal, fresh or chilled:</p>

		<p>---Cuts:</p> <p>----Other</p> <p>02071321</p> <p>-Of fowls of the species Gallus domesticus:</p> <p>--Cuts and offal, fresh or chilled:</p> <p>---Offal:</p> <p>----Midjoint wing</p> <p>02071329</p> <p>-Of fowls of the species Gallus domesticus:</p> <p>--Cuts and offal, fresh or chilled:</p> <p>---Offal:</p> <p>----Other</p>
8.	<p>020714000</p> <p>-Of fowls of the species Gallus domesticus:</p>	<p>02071411</p> <p>-Of fowls of the species Gallus domesticus:</p>

	--Cuts and offal, frozen	--Cuts and offal, frozen: ---Cuts: ----With bone 02071419 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, frozen: ---Cuts ----Other 02071421 -Of fowls of the species Gallus domesticus: --Cuts and offal, frozen: ---Offal: ----Midjoint wing 02071429 -Of fowls og the species Gallus domesticus:
--	--------------------------	--

		--Cuts and offal, frozen: ---Offal: ----Other
9.	020726000 -Of turkeys: --Cuts and offal, fresh or chilled	02072600 -Of turkeys: --Cuts and offal, fresh or chilled
10.	020727000 -Of turkeys: --Cuts and offal, frozen	02072700 -Of turkeys: --Cuts and offal, frozen
	0407 Bird's eggs, in shell, fresh, preserved or cooked	0407 Bird's eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
11.	040700100 -For hatching	04070010 -For hatching
12.	040700900 -Other	04070021 ---Other, in shell, fresh:

		<p>----Of hens</p> <p>04070022</p> <p>---Other, in shell, fresh:</p> <p>----Of ducks</p> <p>04070023</p> <p>---Other, in shell, fresh:</p> <p>----Of geese</p> <p>04070029</p> <p>---Other, in shell, fresh:</p> <p>----Other</p> <p>04070091</p> <p>---Other</p> <p>----Salted eggs</p>
--	--	--

		04070092 ---Other ----Limw-preserved eggs 04070099 ---Other ----Other
	0805 Citrus fruit, fresh or dried	0805 Citrus Fruit, fresh or dried
13.	080530000 -Lemons (citrus liman, citrus limonum) and limes (citrus aurantifolia)	08055000 -Lemons (citrus liman, citrus limonium) and limes (citrus aurantifolia)
14.	080540000 -Grapefruit	08054000 -Grapefruit
15.	080590000	080590000

	-Other	-Other
--	--------	--------

2. China

With respect to the following countries:

- (a) Brunei: No exclusion of any product
- (b) Indonesia: No exclusion of any product
- (c) Myanmar: No exclusion of any product
- (d) Singapore: No exclusion of any product
- (e) Thailand: No exclusion of any product

B. The following parties have not completed their negotiations, and shall complete negotiations on their Exclusion List by 1 March 2003.

- 1. Lao PDR
- 2. Malaysia
- 3. Philippines
- 4. China, with respect to Lao PDR, Malaysia and the Philippines.

Annex 2

Specific Products Covered By The Early Harvest Programme Under Article 6(3)(a)(iii) :

- A. Brunei and Singapore shall be parties to any arrangements that have been agreed on or will be agreed to between China and any other party pursuant to Article 6(3)(a)(iii). Brunei and Singapore shall, as soon as is practically possible after the date of signature of this Agreement, provide the HS codes and product descriptions that will correspond to the HS codes and product descriptions of those specific products that have been agreed to or that will be agreed to between China and any other Party pursuant to Article 6(3)(a)(iii).
- B. The following parties have completed their negotiations with China and their specific products are as follows:
1. Cambodia: Nil
 2. Indonesia:

S/No	HS Code/Product Description (China)	HS Code/Product Description (Indonesia)
1.	09012200	090122000

	-Coffee, roasted: --Decaffeinated	Roasted, decaffeinated coffee
2.	15131100 -Coconut oil and its fractions: --Crude oil	151311000 Crude coconut oil and fractions thereof
3.	15131900 -Coconut oil and its fractions: --Other	151319000 Coconut copra oil (excl. Crude) and fractions thereof
4.	15132100 -Palm Kernel or babassu oil and fractions thereof: --Crude oil	151321000 Crude palm kernel or babassu oil and fractions thereof
5.	15132900 -Palm kernel or babassu oil and fractions thereof: --Other	151329000 Palm kernel or babassu oil (excl. Crude) and fraction
6.	15162000 -Vegetable fats and oils nd	151620000 Vegetable fats and oils and their

	fractions thereof	fractions, hydrogenated
7.	<p>151790000</p> <p>Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading No.15.16:</p> <p>-Other</p>	<p>Edible prep of fats or oils, nes</p>
8.	<p>18061000</p> <p>-Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter</p>	<p>181610000</p> <p>Cocoa powder with added sugar or other sweetening</p>
9.	<p>34011990</p> <p>-Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent:</p> <p>--Other:</p> <p>---Other</p>	<p>340119900</p> <p>Soap and organic surface active product in bars, etc</p>
10.	<p>34012000</p>	<p>340120000</p>

	-Soap in other forms	soap in other forms, nes
11.	40169200 Other articles of vulcanized rubber other than hard rubber: -Other --Erasers	401692000 Erasers of vulcanized rubber
12.	70112010 -For cathode-ray tubes: --Anti-dazzle glass	701120100 Antihalo glass, envelopes for cathode ray tubes
13.	94015000 -Seats of cane, osier, bamboo or similar materials	940150000 seats of cane, osier, bamboo or similar materials 940150900 Seats of other rattan
14.	94038010	940380100

	-Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar materials: ---Of cane, osier, bamboo or similar materials	-Furniture of cane, osier, bamboo or similar materials
--	---	---

3. Lao PDR: Nil

4. Myanmar: Nil

5. Thailand:

S/No	S/No HS Code/Product Description (China)	S/No HS Code/Product Description (Thailand)
1.	27011100 Anthracite	2701110008 Anthracite. Wheter or not pulverized, but not agglomerated
2.	27040010 Coke and Semi-coke	2704000904 Coke and Semi-Coke of Coal, of Lignite or of Peat

6. Vietnam: Nil

C. The following parties have completed their negotiations with China, and shall complete negotiations on their specific products by 1 March 2003 :

1. Malaysia
2. Philippines

Annex 3

A. Product Categories for Tariff Reduction and Elimination Under Article 6(3)(b)(i)

The 3 product categories are defined as follows:

(i) Category 1

For China and ASEAN 6, this refers to all products with applied MFN tariff rates higher than 15%.

For the newer ASEAN Member States, this refers to all products with applied MFN tariff rates of 30% or higher.

(ii) Category 2

For China and ASEAN 6, this refers to all products with applied MFN tariff rates between 5% (inclusive) and 15% (inclusive).

For the newer ASEAN Member States, this refers to all products with applied MFN tariff rates between 15% (inclusive) and 30% (exclusive).

(iii) Category 3

For China and ASEAN 6, this refers to all products with applied MFN tariff rates lower than 5%

For the newer ASEAN Member States, this refers to all products with applied MFN tariff rates lower than 15%.

B. Implementation Timeframes Under Article 6(3)(b)(i)

The Early Harvest Programme shall be implemented no later than 1 January 2004 as follows:

(i) China and ASEAN 6:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vietnam	10%	10%	5%	5%	0%	0%	0%
Lao PDR and Myanmar	-	-	10%	10%	5%	0%	0%
Cambodia	-	-	10%	10%	5%	5%	0%

Product Category 3

Country	Not later than 1 January 2004	Not later than 1 January 2005	Not later than 1 January 2006	Not later than 1 January 2007	Not later than 1 January 2008	Not later than 1 January 2009	Not later than 1 January 2010
Vietnam	5%	5%	0-5%	0-5%	0%	0%	0%
Lao PDR and Myanmar	-	-	5%	5%	0-5%	0%	0%
Cambodia	-	-	5%	5%	0-5%	0-5%	0%

Annex 4

Activities Under Article 6(5)

- (a) Acceleration of the implementation of the Singapore-Kunming Rail Link and Bangkok-Kunming Highway projects under the framework of ASEAN Mekong

Basin Development Cooperation (AMBDC) and the Greater Mekong Sub-region (GMS) Programme respectively.

- (b) Implementation of the mid-term and long-term plans for the all-round development of the Greater Mekong Sub region (GMS) mapped out by the 1st GMS Summit held in Cambodia.
- (c) Designation of the local points in ASEAN Member States and China as the centres to facilitate and promote, through specific procedures and mechanism to be developed, trade and investment between the Parties.
- (d) Exploration of the possibility to develop the mutual recognition arrangements in areas of mutual interests, for example, agricultural products, electronic and electrical equipment, and completed within agreed timeframes.
- (e) Establishment of co-operation mechanism between standards and conformity authorities of the Parties with a view to enhancing trade facilitation and co-operation in other areas.
- (f) Implementation of a Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation between the Parties signed in November 2002.
- (g) Conclusion of a Memorandum of Understanding on co-operation between the Parties in information and communications technology sector.
- (h) Development of specific programmes with a view to further strengthening co-operation in the area of human resources development, utilising, among other mechanism, the ASEAN-China Cooperation Fund.
- (i) Establishing of specific technical programmes with a view to further assisting the newer ASEAN Member States to build their capacity for regional integration and facilitation of the WTO accession process of the non-WTO ASEAN Member States.
- (j) Establishment of co-operation mechanism between customs authorities of the Parties with a view to enhancing trade facilitation and co-operation in other areas.
- (k) Establishment of co-operation mechanism between the relevant authorities of the Parties in the field of Intellectual Property Rights protection.